

LAPORAN PENELITIAN

STUDI RUANG TERBUKA KOTA TANGERANG

Oleh:

Ir. RahelSitumorang, MPlan
Ir. H. Aidid A Gafar, MT
Rissa Yuliana DwiJayanti (08310021)
Ariep Firmansyah Sunarya (08307002)
Dyangra Iqlima (08310007)



Jurusan Teknik Planologi
Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan
Universitas Trisakti
Jakarta
2014

[Type here]

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang telah memberikan berkat dan kesempatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan ini.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pihak yang terkait dengan kajian ruang terbuka kota Tangerang.

Dalam penelitian ini telah dilakukan survey, studi literatur, studi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Selain itu telah dilakukan pula analisis untuk dapat memberikan gambaran umum permasalahan penelitian.

Walaupun penelitian ini telah selesai dilakukan, namun peneliti tetap mengharapkan masukan dan sumbangan pemikiran agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2014

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota sebagai pusat pemukiman, industri, dan perdagangan telah mengalami perubahan di lingkungan fisik lahan yang semakin padat oleh berbagai infrastruktur sehingga berdampak terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Perubahan lingkungan fisik lahan tersebut apabila tidak diimbangi dengan penambahan ruang terbuka hijau dapat menyebabkan menurunnya kualitas air dan udara, berkurangnya daerah tangkapan air, dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dan keterbatasan lahan yang tersedia ini menimbulkan permasalahan baru di sebuah kota. Apabila kota tersebut tidak memiliki daya tampung yang sesuai dengan arus perpindahan penduduk dan tidak ditangani dengan penataan ruang yang baik, maka dapat menyebabkan menurunnya kualitas suatu lingkungan.

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di kawasan perkotaan Jabodetabek yang mengalami perkembangan pesat. Selain dikenal sebagai kota industri, Kota Tangerang juga merupakan daerah pengembangan kawasan permukiman bagi para komuter yang bekerja di Jakarta. Kota Tangerang memiliki luas wilayah 18.378Ha (Kota Tangerang dalam Angka, 2009). Dari luas tersebut pertumbuhan fisik kota ditunjukkan oleh kawasan terbangun kota, yaitu seluas 10.127,231 Ha (57,12% dari luas keseluruhan kota) dengan urutan penggunaan lahan tertinggi sebagai kawasan permukiman (5.988,2 Ha) (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2008 dalam Pancawati, 2010). Luas kawasan permukiman diperkirakan akan meningkat pesat mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk per tahun untuk masing-masing kecamatan di Kota Tangerang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000-2010) cukup tinggi, yakni di atas 2 persen. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tangerang yaitu 1.797.715 orang (BPS Kota Tangerang, 2010). Jumlah penduduk yang meningkat pesat akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang.

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan bagi wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang. Selain menambah nilai estetika dan keasrian kota, ruang terbuka hijau juga berfungsi menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida, mengurangi polutan, serta membantu mempertahankan ketersediaan air

tanah. Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

Kawasan situ sebagai sumber daya air permukaan memiliki potensi dan manfaatnya yang strategis dan bersifat serba guna baik secara ekologis maupun ekonomis. Ada masalah yang dihadapi didalam pemanfaatan kawasan situ diantaranya adalah kurangnya informasi tentang fungsi, potensi dan kendala untuk pemanfaatannya, sehingga berakibat terdapat perubahan fungsi kawasan dan penurunan kualitas fisik situ.

Situ / rawa sebagai bagian dari sistem DAS (daerah aliran sungai) memiliki berbagai fungsi penting, seperti tempat penampungan air untuk pengendalian banjir, konservasi sumberdaya air (pemasok air tanah), maupun pengembangan ekonomi lokal (budidaya ikan atau tempat rekreasi). Terkait dengan fungsi situ sebagai pengendali banjir, maka situ memiliki peranan yang penting sebagai daerah parkir air (*retarding basins*) untuk mengurangi banyaknya air limpasan / penahan laju air (*water retention*). Oleh karena itu menjaga kualitas luasan dan kedalaman situ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanggulangan banjir.

Bertolak dari pentingnya menjaga kelestarian situ, maka keberadaan situ di Kota Tangerang, saat ini menunjukkan penurunan kondisi. Hal ini, tercermin dari berkurangnya jumlah dan luasan situ, dari yang semula terdata sebanyak 9 situ, saat ini hanya tersisa 5 situ, dengan penyusutan luas areal situ berkisar sebesar 41%, yaitu dari 257 Ha menjadi 152 Ha. Sudah tentu kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya fungsi situ sebagai pengendali banjir, sehingga menyebabkan semakin meluasnya lokasi, tinggi dan lamanya genangan banjir.

Oleh karena itu diperlukan suatu analisa tentang kondisi fisik lingkungan Kota Tangerang khususnya kondisi RTH dan situ. Mengingat fungsi dari keduanya sangat penting bagi Kota Tangerang baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud dan Tujuan Studio Perencanaan Kota

Maksud dari Studio Perencanaan Kota yaitu memahami tentang bagaimana mengaplikasikan konsep, teori, kaidah, dan teknik perencanaan dalam lingkup kota. Selain itu mempelajari perencanaan kota dengan melalui pengembangan fisik lingkungan, ekonomi, sosial, dan transportasi kota. Pada akhir pembelajaran Studio Perencanaan Kota diharapkan mahasiswa dapat melakukan evaluasi terhadap perencanaan perkotaan suatu wilayah.

1.2.2 Maksud dan Tujuan Wilayah Studi

Maksud dari pemilihan wilayah studi mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang khususnya dalam bidang fisik lingkungan. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan memberikan suatu saran, kritik dan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas fisik lingkungan Kota Tangerang.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Teritorial

Area studi terletak di Kota Tangerang diantaranya RTH yang berupa tutupan lahan bervegetasi pohon/tanaman keras (membentuk pola memanjang jalur di sepanjang sungai, jalan dll) dan tutupan lahan bervegetasi semak, rumput, dan tanaman pertanian (membentuk pola menyebar). Selain RTH, fokus studi juga dilakukan pada situ Kota Tangerang diantaranya Situ Rawa Cipondoh di Kecamatan Cipondoh, Situ Gede di Kecamatan Tangerang, Situ Bulakan di Kecamatan Periuk, Situ Cangkring di Kecamatan Periuk, Situ Serpong di Kecamatan Pinang.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansial

Dalam studi ini akan mengidentifikasikan masalah dari aspek fisik lingkungan yang terkonsentrasi pada identifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau dan evaluasi fungsional dari ruang terbuka hijau dan fungsional situ di Kota Tangerang.

1.4 Perumusan Masalah

Berkembangnya Kota Tangerang yang ditandai dengan penduduk dan aktivitasnya, secara tidak langsung mengakibatkan tekanan yang tinggi pada pemanfaatan ruang. Keberadaan kawasan hijau di perkotaan seringkali dikalahkan oleh kebutuhan lain, seperti pengembangan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan dan aktivitas komersial lain, sehingga kualitas dan kuantitasnya semakin hari semakin berkurang. Di sisi lain, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, keberadaan akan RTH sebagai penyedia jasa lingkungan semakin dibutuhkan. Kualitas dan kuantitas RTH harus terus disesuaikan dengan perkembangan penduduk agar tercipta Kota Tangerang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sama halnya dengan keberadaan situ di Kota Tangerang yang semakin hari semakin tidak mengarah upaya berkelanjutan. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten tahun 2010, sebanyak empat situ dari sembilan

situ yang ada di Kota Tangerang hilang. Selain hilangnya situ ini akibat pembangunan liar, juga ada situ yang tidak terdata oleh pemerintah. Terjadinya penurunan kondisi situ ini tidak terlepas dari 2 permasalahan utama, yaitu permasalahan fisik seperti alih fungsi lahan situ menjadi lahan terbangun maupun pendangkalan situ (proses sedimentasi) serta permasalahan non fisik seperti ketidakjelasan batasan kewenangan pengelolaan situ antara pemerintah pusat, propinsi dan kota. Merujuk pada semakin menurunnya kondisi situ, sementara keberadaan situ wajib dilindungi dan dilestarikan fungsinya, maka sudah selayaknya perlu dikembangkan konsep pengelolaan situ sebagai pedoman untuk menjaga kelestarian situ, bagi mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Oleh karena itu perumusan masalah pada studi ini yaitu :

- Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau dan situ – situ di Kota Tangerang?
- Mengapa pengembalian fungsi ruang terbuka hijau dan situ menjadi sangat penting?
- Bagaimana arah pola pengembangan RTH dan situ – situ di Kota Tangerang ?

1.5 Metode Penelitian

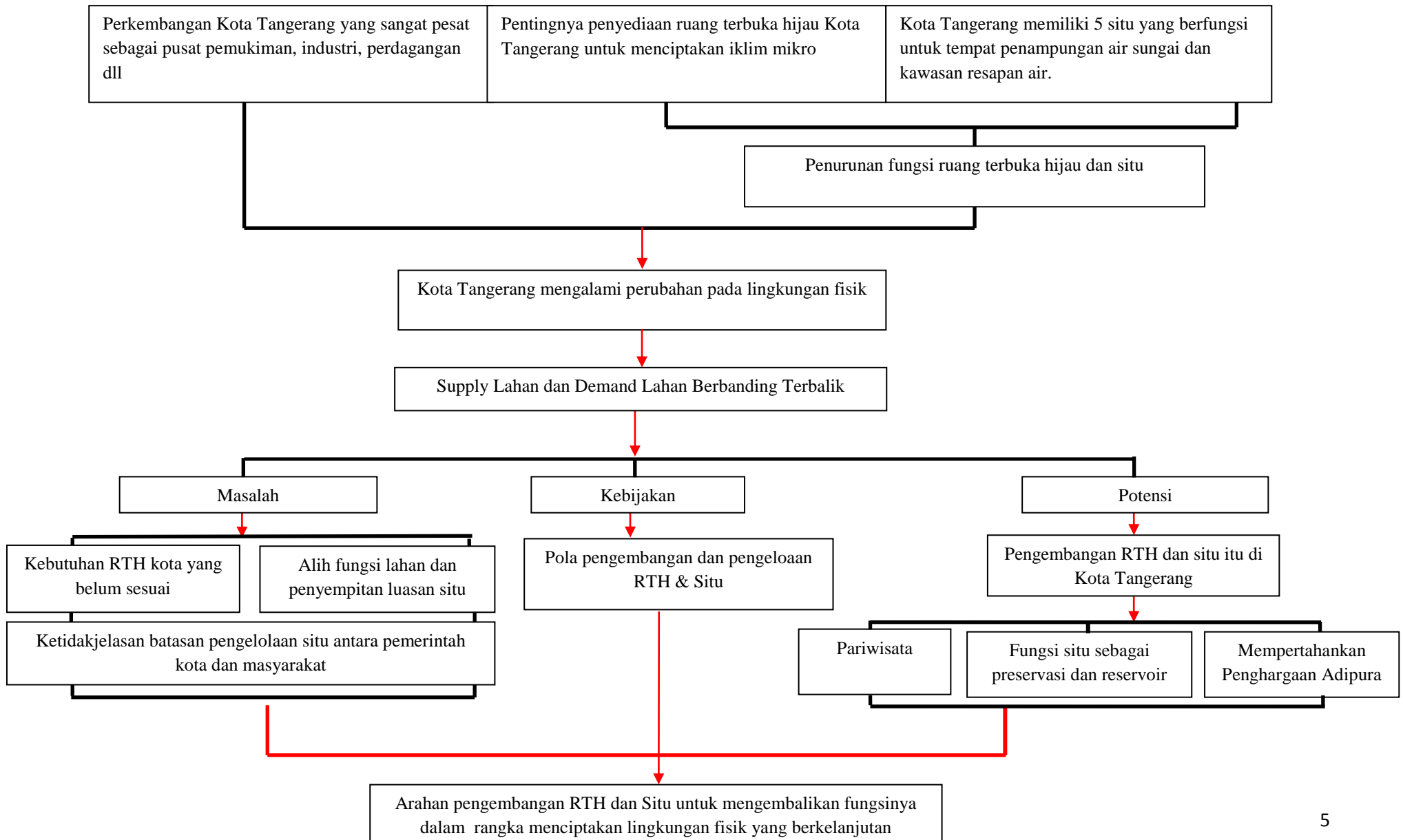
Metode dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan, serta menganalisis data sesuai dengan kebutuhan. Adapun lokasi, waktu, dan tahapan penelitian yang dilakukan meliputi :

1.5.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukn di wilayah administrasi Kota Tangerang Provinsi Banten. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data, analisis, dan diakhiri dengan penyusunan laporan, pada bulan September hingga Desember 2013. Kota Tangerang secara geografis terletak antara 6°6' Lintang Utara sampai 6°13' Lintang Selatan dan 106°36' Bujur Timur sampai dengan 106°42' Bujur Timur. Batas-batas wilayah penelitian adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
- Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta

Kerangka Berpikir



1.5.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ruang terbuka hijau dan kondisi eksisting situ di Kota Tangerang. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh langsung melalui pengamatan di lapangan serta dengan melakukan wawancara kepada warga sekitar. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dari literatur dan dokumen yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data administrasi, data fisik dan biofisik, data sosial demografi dan data lainnya yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut :

- Peta administrasi Kota Tangerang
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang tahun 2008 – 2028
- Peraturan-perundangan yang terkait dengan RTH dan situ
- Luas wilayah, jumlah penduduk
- Jumlah situ
- Luasan RTH Kota Tangerang

1.5.3 Metode Analisa Data

a) Metode Perbandingan Luasan RTH antara Eksisting dan Peraturan

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 luas RTH Perkotaan yaitu minimal 30% dari luas kota keseluruhan. Yang terdiri dari 20% luas RTH Publik dan 10% RTH Privat.

b) Metode Skoring Untuk Menilai Kualitas Situ

Analisis ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas situ berdasarkan 7 (tujuh) parameter penilaian berupa penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir, kedalaman waktu musim hujan, penurunan muka air pada saat musim kemarau, batas situ berikut sempadan situ, keberadaan bangunan air, prosentase tutupan vegetasi air/gulma dan kualitas air.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penyusunan penelitian, masalah, perumusan masalah, tujuan sasaran, ruang lingkup, ruang lingkup penelitian,

yang berupa ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai literatur dan teori yang berkaitan dengan pembahasan topik penelitian. Literatur dan teori yang digunakan akan disesuaikan dengan pembahasan agar dapat terlihat jelas tentang ketertarikan antara masalah yang ada dengan teori yang ada.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai wilayah studi kasus yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi batasan wilayah studi, kependudukan, penggunaan lahan serta gambaran mengenai kondisi RTH dan situ di wilayah studi.

BAB IV ANALISIS DAN SINTESIS

Bab ini berisi deskripsi dan hasil analisis studi kasus berdasarkan kajian teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Menganalisis kondisi eksisting dengan kebijakan yang terkait.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi hasil pemikiran penulis atau simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Serta saran untuk perbaikan kualitas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ruang Terbuka

Ruang Terbuka adalah wadah bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya untuk dapat hidup dan berkembang secara berkelanjutan, sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun, di wilayah perkotaan mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi, konservasi lahan, dan sumber daya alam lainnya atau keperluan sejarah dan keindahan (Green, 1959).

Ruang Terbuka adalah lahan tidak terbangun di dalam kota dengan penggunaan tertentu. Pertama kali ruang terbuka didefinisikan secara umum sebagai bagian dari lahan kota yang tidak ditempati oleh bangunan dan hanya dapat dirasakan keberadaannya jika sebagian atau seluruh lahannya dikelilingi pagar. Selanjutnya ruang terbuka kota didefinisikan sebagai lahan dengan penggunaan spesifik yang fungsi atau kualitasnya terlihat dalam komposisinya. (Rapuano, 1964)

Ruang Terbuka merupakan ruang aktivitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Ruang terbuka merupakan wadah kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat, dalam rutinitas normal kehidupan sehari – hari maupun dalam kegiatan – kegiatan periodik. (Carr, 1992)

Ruang Terbuka (Open Space) adalah lahan – lahan atau area – area yang dimanfaatkan sebagai taman – taman, lapangan – lapangan olah raga dan tempat – tempat bermain. Ruang terbuka di dalam kota dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu taman estetika, taman pendidikan, dan taman olahraga atau lapangan bermain. (Chapin, 1965 :156)

Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/lajur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan).

Ruang terbuka merupakan lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan. Ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak – anak, perkuburan dan daerah hijau pada umumnya (Kamus Tata Ruang, Direktorat Jendral Cipta Karya, 1998). Ruang terbuka merupakan ruang yang terbentuk antar masa bangunan atau ruang yang mempunyai peruntukkan sebagai ruang terbuka. Ruang terbuka dapat berbentuk jalan, taman, dan sebagainya. Ruang terbuka dapat di kategorikan ke dalam dua bentuk umum yang disebut *Ruang Kota dan Ruang Terbuka* (Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto, 1999)

a. Ruang Kota

Ruang Kota dibedakan oleh karakteristik yang menonjol, seperti kualitas pengolahan detail dan aktivitas kegiatan yang berlangsung di dalamnya. suatu ruang kota secara ideal dilingkupi oleh

dinding, lantai, dan mempunyai maksud untuk melayani. Sekelompok bangunan, baik perkantoran maupun komersil dapat membentuk ruang disekelilingnya yang berupa plaza, jalan atau ruang terbuka lainnya. Ruang tidak hanya berbentuk pulau di dalam kota, tetapi ruang kota dapat berbentuk koridor. Jalan dapat dikategorikan sebagai “Linear Urban Space”. Ruang koridor adalah ruang untuk pergerakan linier, sedangkan ruang pulau adalah untuk melakukan pemberhentian (Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto, 1999). Ruang kota terbentuk oleh masa bangunan di perkotaan. Ruang yang berbentuk geometris dengan kualitas ruang yang beragam, dapat dilihat dari segi kualitas karakteristik dan estetika. (Krier, 1986)

b. Ruang Terbuka

Ruang terbuka dapat dikategorikan sebagai unsur ruang alam yang dibawa ke dalam kota atau lapangan terbuka. Skala ruang terbuka ini lebih banyak ditentukan oleh pohon-pohon, semak – semak, batu – batuan, dan permukaan tanah daripada ditentukan oleh lebar dan panjangnya. Ruang terbuka dapat dicirikan dengan pemandangan tumbuh – tumbuhan alam. Ruang terbuka di dalam kota mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai pelengkap bentuk kota dan menyediakan tanah untuk penggunaan masa datang (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999). Ruang terbuka adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang / jalur tanpa bangunan di atasnya. Ruang terbuka dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut :

1. Ruang terbuka sebagai sumber produksi, antara lain : Hutan, Pertanian, Produksi mineral dan lain – lain.
2. Ruang terbuka sebagai perlindungan terhadap kekayaan alam dan manusia, antara lain : cagar alam, kehidupan air atau laut, daerah budaya dan sejarah.
3. Ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan, antara lain untuk melindungi kualitas air tanah, pembuangan sampah, memperbaiki dan mempertahankan kualitas udara, juga untuk rekreasi. (Hakim, 1987 dalam Hubert, 2001)

2.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.2.1 Pengertian Umum RTH

Pengertian RTH, adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebangun lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” (Purnomohadi, 1995).

Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami, menyangkut hirarki dari lingkup hunian sampai lingkup kota, ada area yang tanpa pepohonan dan pada area rekreasi biasanya terdapat pepohonan, hampir seluruhnya dikelola oleh pemerintah (Grey dan Deneke, 1978). Ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Pedoman Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu sebarang lahan terbuka yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografi tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai ciri utama dan tumbuhan lainnya (*perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup lainnya*) sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda – benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi Ruang Terbuka Hijau yang bersangkutan. (Purnomohadi, 1996 dalam Winata, 2000 : 11). Kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi pertumbuhan habitat tertentu, sebagai sarana kota atau lingkungan, pengaman jaringan prasarana, dan budidaya pertanian. (BAPPEDA, 1999). Ruang Terbuka Hijau adalah merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Ruang Terbuka Hijau merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuh – tumbuhan yang dimanfaatkan untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota atau lingkungan, dan juga pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian (DTK DKI Jakarta, 2001). Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah maupun yang sengaja ditanam. (UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

2.2.2 Jenis Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No.6 tahun 1999 membagi Ruang Terbuka Hijau menjadi dua yaitu, kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan.

a. Kawasan Hijau Lindung

Merupakan bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Dalam kawasan ini termasuk diantaranya :

1. Cagar Alam
2. Hutan Lindung

Kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamiahnya diperuntukkan sebagai pengatur tata guna air, pencegah banjir, erosi, abrasi dan intrusi, serta perlindungan terhadap kesuburan tanah.

3. Hutan Wisata

Kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai pusat rekreasi kunjungan wisata alam.

b. Kawasan Hijau Binaan

Merupakan bagian dari kawasan hijau di luar kawasan lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan, maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.

1. Ruang Terbuka Hijau Fasilitas Umum
2. Ruang Terbuka Hijau fungsi pengaman
3. Penghijauan Pulau
4. Ruang Terbuka Hijau Budidaya Pertanian

2.2.3 Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan merupakan salah satu bagian dari ruang kota yang sangat penting nilainya, tidak hanya ditinjau dari segi fisik dan sosial, tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis. (Nurisjah dan Pramukanto,1995). Fungsi Ruang Terbuka Hijau dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu (Menurut Grey dan Deneke,1978) :

1. Perbaikan Iklim

Faktor utama yang mempengaruhi iklim adalah : sinar matahari, temperatur udara, pergerakan angin dan kelembapan. Zona kenyamanan dapat ditentukan oleh berbagai macam pandangan dari individu, jenis kelamin, umur, dan iklim didaerah sekitar. untuk mengontrol suhu di sekitar lingkungan taman dapat dengan menggunakan jenis pepohonan tertentu.

2. Pemanfaatan bidang keteknikan

Memadukan antara manfaat estetika dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, seperti pengontrol erosi tanah, pengendali polusi udara, bunyi dan sebagainya.

3. Pemanfaatan bidang arsitektur

Perancangan suatu gedung dan bangunan akan memberikan hasil yang lebih baik apabila disertai dengan pengaturan struktur Ruang Terbuka Hijau disekitarnya. Vegetasi tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan desain bangunan.

4. Pemanfaatan bidang estetika

Keberadaan vegetasi dengan berbagai variasi bentuk struktur dan warna akan mempercantik bentuk dari suatu taman.

Pada faktor lain fungsi dari Ruang Terbuka Hijau dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

a. Fungsi sosial

Ruang Terbuka Hijau merupakan fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga. Fungsi sosial utama dari Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai sarana relaksasi.

b. Fungsi estetika

Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai pengikat antar elemen gedung di dalam kota, pemberi cirri dalam membentuk wajah kota dan sebagai unsure dalam penataan arsitektur perkotaan. Ruang Terbuka Hijau memberikan efek visual yang indah.

c. Fungsi Ekologis

Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai paru – paru kota, melindungi sistem tata air, peredam bunyi, mengatur sirkulasi udara dan menahan perkembangan lahan terbangun (sebagai penyangga).

Dalam Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau ada sembilan fungsi utama (Djoko Sujarto, 1995) yaitu :

1. Suatu ruang untuk kegiatan rekreasi, pendidikan dan sosialisasi masyarakat kota.
2. Suatu ruang yang dapat melindungi dan melestarikan keindahan alami serta bangunan dan struktur bernilai budaya dan sejarah.
3. Mengawetkan dan melestarikan sumber daya alam atau wilayah secara ekologi.
4. Menyediakan atau memelihara lahan untuk kepentingan suatu produksi sumber daya alam termasuk wilayah resapan dan sumber bahan baku air bersih.
5. Melindungi dan menyediakan ruang untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan.
6. Meningkatkan nilai basis ekonomi alam suatu kota.
7. Melestarikan dan mengembangkan skala dan identitas lingkungan komunitas.
8. Sebagai penyangga, pembatas suatu kawasan kegiatan fungsional kota tertentu atau sebagai wilayah pembatas dan pengendali perkembangan wilayah terbangun kota.
9. Sebagai paru – paru kota yang akan berfungsi sebagai penyaring dan pembersih udara.

2.3 Klasifikasi Kepemilikan RTH Privat & Publik

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan <ul style="list-style-type: none"> a. Pekarangan rumah tinggal b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha c. Taman atap bangunan 		V V V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Taman RT b. Taman RW c. Taman Kelurahan d. Taman Kecamatan e. Taman Kota f. Hutan Kota g. Sabuk Hijau (<i>green belt</i>) 	V V V V V V V	 V V V V
3.	RTH Jalur Hijau Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pulau jalan dan median jalan b. Jalur pejalan kaki c. Ruang dibawah jalan layang 	V V V	 V V
4.	RTH Fungsi Tertentu <ul style="list-style-type: none"> a. RTH sempadan rel kereta api b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi c. Pemakaman 	V V V	

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Semua pembahasan di atas merupakan pembagian kepemilikan RTH privat maupun publik, namun pada pembahasan tugas akhir ini lebih mengarah kepada RTH publik.

a. Ruang Terbuka Hijau Publik

Merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau publik antara lain , adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

b. Ruang Terbuka Hijau Privat

Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau privat antara lain adalah kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi Ruang Terbuka Hijau privat sedikit 10% dari luas wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan mencakup dua jenis yaitu :

- a. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Publik adalah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan publik tidak dapat dialihfungsikan.
- b. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Privat adalah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan privat dikelola oleh Perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2.4 Standar Perhitungan Ruang Terbuka Hijau

Penggolongan sarana Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis Ruang Terbuka Hijau tersebut adalah :

- a. Setiap unit RT = kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak.
- b. Setiap unit RW = kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang – kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, disamping daerah – daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat main anak – anak dan lapangan olahraga kegiatan olahraga.
- c. Setiap unit kelurahan = kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olahraga, upacara serta kegiatan lainnya.
- d. Setiap unit kecamatan = kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang – kurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket, dan lain – lain, upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka)
- e. Setiap unit kecamatan = kawasan berpenduduk lebih dari 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang – kurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/ pemakaman umum, dan

- f. Selain taman dan lapangan olahraga, harus disediakan jalur – jalur hijau sebagai cadangan/ sumber – sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industry, dengan lokasi menyebar.
- g. Diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar.
- h. Pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau atau ruang interaksi social (*river walk*) dan olahraga.

Kebutuhan luas lahan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m²/penduduk. Kebutuhan lahan tersebut adalah:

- a. Taman untuk unit RT = 250 penduduk, sekurang – kurangnya diperlukan 250 m² atau dengan standar 1 m²/penduduk.
- b. Taman untuk unit RW = 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m² atau dengan standar 0,5 m²/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip, dan sebagainya.
- c. Taman dan lapangan olahraga untuk unit kelurahan = 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m² atau dengan standar 0,3m²/penduduk
- d. Taman dan lapangan olah raga untuk unit kecamatan = 120.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 24.000m² (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m²/penduduk.
- e. Dibutuhkan jalur hijau seluas 15m²/penduduk yang lokasinya menyebar, dan
- f. Besarnya lahan kuburan /pemakaman umum tergantung dari system penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing – masing. Acuan perhitungan luas berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan.
- g. Persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka mempertimbangkan lokasi penempatan dan penyelesaian ruang seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan luas lahan min (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan penyelesaian
1	Taman/ tempat main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga.
2	Taman/ tempat main	2.500	1.250	0,5	1000	Di pusat kegiatan lingkungan.
3	Taman dan lapangan	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan

	olahraga					sarana pendidikan.
4	Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5	Jalur hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar
6	Kuburan/ pemakaman umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.5 Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal sebagaimana ditunjukkan pada lampiran

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (m ²)	Luas Minimal/ Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 Jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 Jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar

Sumber : Permen PU Pedoman Panyediaan RTH Publik 20%

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

b. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:

- a. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- d. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- a. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput;
- b. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

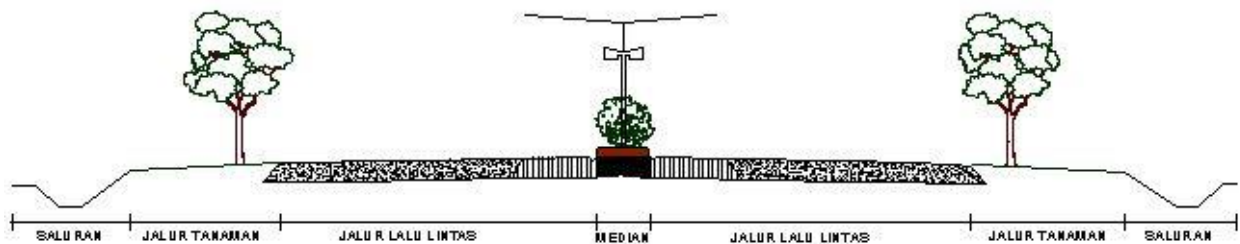
- RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- Hutan kota;

- Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya. Fungsi lingkungan sabuk hijau:
- Peredam kebisingan;
- Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
- Penapis cahaya silau;
- Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
- Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur. $Pt + Kt + Tt, Lt = m^2 (54)(0,9375)(2)$
- Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- Penyerap dan penepis bau;
- Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- Mengatasi penggurunan.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Gambar 2.1 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan



Sumber : Permen PU Pedoman Panyediaan RTH Publik 20%.

e. Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan

menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.

a. Pada jalur tanaman tepi jalan

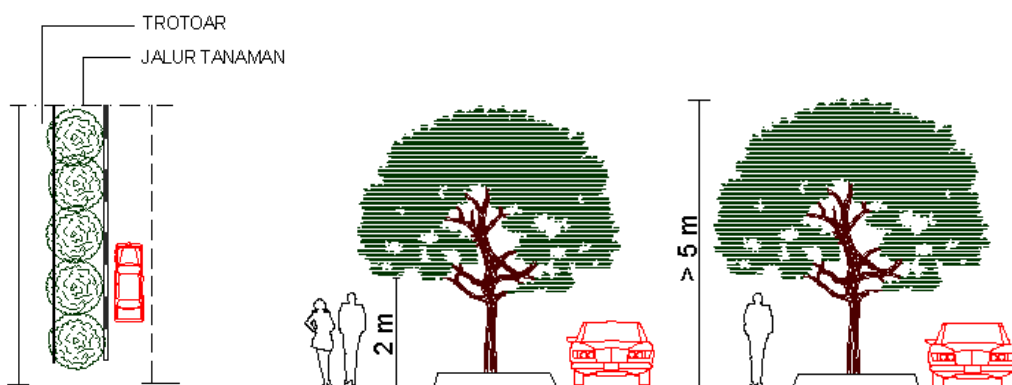
1) Peneduh

- a) ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median);
- b) percabangan 2 m di atas tanah;
- c) bentuk percabangan batang tidak merunduk;
- d) bermassa daun padat;
- e) berasal dari perbanyakan biji;
- f) ditanam secara berbaris;
- g) tidak mudah tumbang.

Contoh jenis tanaman:

- a. Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- b. Tanjung (*Mimusops elengi*)
- c. Bungur (*Lagerstroemia floribunda*)

Gambar 2.2 Contoh RTH Tepi Jalan



Sumber : Permen PU Pedoman Panyediaan RTH Publik 20%

Penyerap polusi udara

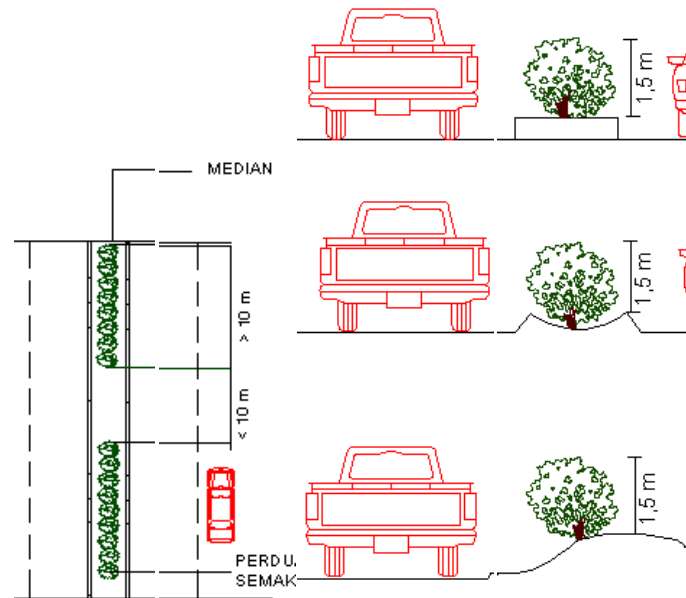
- a. terdiri dari pohon, perdu/semak;
- b. memiliki kegunaan untuk menyerap udara;
- c. jarak tanam rapat;
- d. bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman:

- a. Angsana (*Ptherocarpus indicus*)
- b. Akasia daun besar (*Accasia mangium*)

- c. Oleander (*Nerium oleander*)
- d. Bogenvil (*Bougenvillea Sp*)
- e. Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)

Gambar 2.3 Contoh RTH Median Jalan



Sumber : Permen PU Pedoman Panyediaan RTH Publik 20%

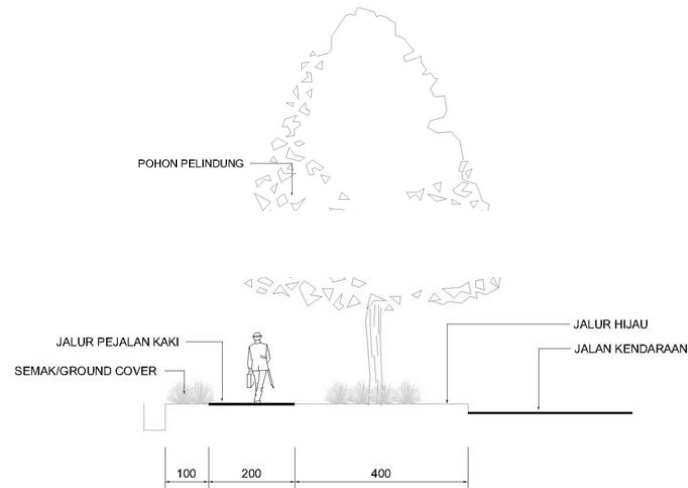
f. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
 - Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
- 2) Karakter fisik, meliputi:
 - Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;

- Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

Gambar 2.4 Contoh Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki



Sumber : Permen PU Pedoman Panyediaan RTH Publik 20%

- 3) Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

g. RTH Fungsi Tertentu

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

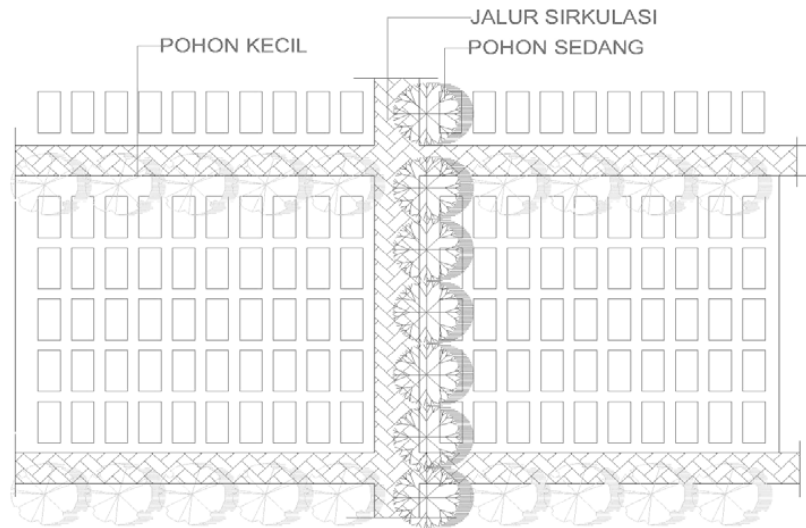
g.1 RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a) ukuran makam 1 m x 2 m;
- b) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;

- c) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
- d) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

Gambar 2.5 Contoh Pola Penanaman pada RTH Pemakaman



Sumber : Permen PU Pedoman Panyediaan RTH Publik 20%

2.6 Pengelolaan RTH Kota

Pendekatan-pendekatan yang terkait dengan unsur-unsur penting dalam pengelolaan (manajerial), yaitu :

- a. Menurut Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2006 Agar perencanaan pembangunan perkotaan dapat mencapai hasil dimana mampu dipertahankannya fungsi lingkungan kota yang berkelanjutan, sebagaimana diharapkan dalam prinsip “good environmental government”, diperlukan minimal 3 (tiga) modal dasar pembangunan, yaitu:
 1. Tersedianya pengelola kota yang handal, berupa sumberdaya manusia (SDM) baik pejabat pemerintah maupun masyarakat umum dan skala nasional dan skala lokal yang mampu memelihara fungsi dan kondisi lingkungan perkotaan sesuai kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ada.
 2. Tersedianya dukungan sumber daya finansial yang berkelanjutan pula untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan pengawasan RTH kota.
 3. Tersedianya Rencana Induk Kota yang komprehensif dan dinamis, yang artinya terus berkembang sejalan dengan proses kehidupan lingkungan perkotaan yang dinamis.

- b. Menurut Budhy Thahjati, 1995 Penerapan Undang-Undang Penataan Ruang memerlukan dukungan antara lain, peraturan, kelembagaan terkait, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Unsur penting dalam aspek manajerial RTH kota yang didasarkan dari pendekatan-pendekatan diatas. Dengan begitu, aspek legal (peraturan), prosedur (cara pengelolaan sesuai dengan prioritas rencana), kelembagaan (Sumber Daya Manusia), dan pembiayaan (Sumber Daya Finansial) merupakan aspek penting dalam manajerial RTH kota.

1. Aspek Legalitas

RTH memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam menunjang kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan RTH menjadi salah satu elemen dari pembangunan yang berkelanjutan. Ada beberapa peraturan yang terkait dengan RTH di Indonesia. Dalam UU No.26/2007 tentang 34 penataan Ruang ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang dipersyaratkan adanya kawasan lindung. Kawasan lindung berdasarkan Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dapat berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan khusus. Kawasan ini diperlukan guna menjaga kondisi lingkungan disuatu daerah. Dalam UU.No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan beberapa tujuan dari pengelolaan hidup, yang diantaranya:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai sasaran-sasaran diatas, salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan dan pengelolaan RTH. Mengingat fungsi dan manfaat dari RTH yang sangat berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan, maka dapat dilihat bahwa RTH punya peran yang cukup penting didalam mewujudkan tujuan tersebut. Beberapa peraturan yang ada saat ini cukup banyak berkaitan dengan RTH. Tapi yang berkaitan secara langsung hanyalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Wilayah Perkotaan.

2. Prosedural

Menurut Gie (1982), prosedural adalah kerja berpola dalam melakukan pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pencapaian tujuan penataan ruang yang berkualitas menyangkut pemanfaatan RTH, dibutuhkan prosedur penyusunan program pembangunan yang sejalan dengan RTRW. Rangkaian kegiatan ini merupakan suatu kesatuan dalam pemanfaatan ruang yang optimal. Dalam pengelolaan RTH, instansi yang berkaitan seperti Dinas pertamanan harus memiliki kemampuan dalam menyusun suatu program terpadu, dalam rangka mewujudkan perkembangan RTH yang dialokasikan sesuai dengan jenis RTH yang akan dikembangkan. Rencana RTH ini merupakan hasil awal proses pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti.

Agar rencana tata ruang yang telah disusun dapat dioperasikan di lapangan, maka diperlukan adanya pedoman atau tata cara penjabaran strategi pemanfaatan ruang sebagai keluaran rencana tata ruang kedalam bentuk program pelaksanaan. Sistem penyelenggaraan pembangunan daerah di Indonesia, berpedoman pada prosedur perencanaan, sumber tertib hukum dan peraturan perundangan yang akan mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

3. Kelembagaan

Dalam merancang, mengembangkan dan pengelolaan RTH Kota, diperlukan institusi yang profesional, yaitu instansi di pemerintahan perkotaan. Lembaga sebagai tenaga pelaksanaan atau dinas ini akan terlibat langsung dalam menata ruang terbuka, sehingga lembaga ini harus diwujudkan menjadi suatu lembaga yang kuat, yang dapat memikirkan dan mengkoordinasikan penghijauan kota.

Pelaksanaan dalam pengelolaan RTH Kota sangat dibutuhkan kelembagaan yang profesional di bidang penghijauan kota, karena penghijauan kota menyangkut desain tanam, studi pengembangan RTH, pelaksanaan program dan proyek pemeliharaan/pengelolaan pertanaman, penyediaan bermacam bibit yang

sesuai dengan kondisi daerah, dan usaha penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tugas ini dibutuhkan adanya kerjasama yang efektif baik dengan lembaga-lembaga terkait maupun pihak swasta dan masyarakat. Institusi yang berwenang dalam pemeliharaan RTH Kota terutama adalah pemerintah, selain itu yang berperan dalam pemeliharaan adalah pihak swasta, masyarakat, lembaga dan kerjasama dari ketiga dengan pemerintah. Pengelolaan RTH dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga.

a) Pemerintah

Tugas utama pemerintah dalam pengelolaan RTH, yaitu:

- a. Memberikan penyuluhan kepada semua pihak akan pentingnya fungsi dan keberadaan RTH.
- b. Merencanakan RTH baik sebagai bagian dari RTRW Kota, RDTR, rencana tata ruang wilayah lainnya ataupun Rencana Tata Hijau.
- c. Menyediakan luasan dan sebaran RTH yang memadai bagi kotanya.
- d. Memelihara RTH yang ada sebagai salah satu komponen peningkatdaya dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.
- e. Memfasilitasi pelaku pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
- f. Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun.
- g. Menyusun program ruang terbuka hijau termasuk aspek pembiayaan dan instansi/pelaku pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.
- h. Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk merumuskan pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban RTH yang tidak berada dibawah wewenang langsung pemerintah daerah kota maupun pemerintah tingkat tinggi.

b) Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan RTH, yaitu:

- a. Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai perdagangan dan tidak menebang pohon.
- b. Memelihara RTH di wilayah lingkungan perumahan.
- c. Ikut mengawasi pemeliharaan dan keberadaan RTH.
- d. Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH.
- e. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada mampu yang potensial dikembangkan.
- f. Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan.

C) Swasta

Peran swasta dalam pengelolaan RTH, yaitu:

- a. Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai area perdagangan, dan tidak menebang pohon.
- b. Memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan RTH.
- c. Memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja serta mendapat keuntungan lain seperti pemasangan iklan/reklame.
- d. Menyediakan lahan RTH dalam setiap pembangunan perumahan, perdagangan, dan jasa serta perkantoran.
- e. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.

d) Lembaga

Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan RTH, yaitu lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan LSM yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan. Peran lembaga-lembaga tersebut, yaitu:

- a. Penyuluhan pendidikan yang berkaitan dengan RTH melalui media.
- b. Pencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan RTH dari tingkat RT sampai kota.
- c. Menyediakan lahan untuk cadangan RTH.
- d. Memberikan bantuan dalam identifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.

4. Aspek Pembiayaan dalam Pengelolaan RTH Kota

Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang (UU No.26/2007). Pengembangan RTH dipersyaratkan dukungan dana dan peralatan yang sebanding, agar tujuan pengembangan RTH menjadi kenyataan.

Rencana pengembangan RTH Kota yang telah dialokasikan atau dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, dijabarkan dalam kebijaksanaan kawasan yang diatur menurut tata cara (aspek legal), dan kesiapan kelembagaan pemerintah perlu didukung oleh program pengembangan pembiayaan dari berbagai kemungkinan sumber dana pemerintah kota yang terprogram dan berkesinambungan. Pemerintah daerah yang dihadapkan oleh keterbatasan dana, sehingga pengembangan RTH dilakukan secara bertahap, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan, pendanaan penataan ruang terbuka hijau kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2.7 Pengertian Situ

Situ merupakan istilah dalam bahasa Sunda yang dapat diartikan sebagai danau alam atau danau buatan. Didalam Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpuncur, situ didefinisikan sebagai suatu wadah tampungan air di atas permukaan tanah, yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai suatu siklus hidrologis, yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Ukuran situ yang relatif kecil dibandingkan danau dan digolongkan ke dalam ekosistem perairan tawar terbuka yang dinamis dan menjadi bagian siklus hidrologis yang potensial. Kualitas dan kuantitas airnya berhubungan dengan tata air dan drainase wilayah situ tersebut berada serta dipengaruhi oleh tipe pemanfaatan badan air situ dan pemanfaatan lahan di dalam wilayah tangkapannya (PSDA, 2003).

Situ terbagi menjadi dua yaitu situ alami yang terbentuk secara alami dengan sumber air berasal dari dalam tanah maupun air permukaan, dan situ buatan dengan sumber airnya bersumber dari air permukaan dan biasanya mempunyai fungsi sebagai pengendali banjir. Situ memiliki beberapa fungsi yang penting diantaranya adalah (KLH, 2007) :

a. Menjadi bagian sistem ekologi dan sistem tata air bagi wilayah sekitarnya

- b. Kawasan Situ menjadi kawasan resapan air.
- c. Menjadi daerah tampungan air, agar menjadi wadah sementara air sebelum mengalir ke sungai
- d. Pada kondisi tertentu dapat menjadi pembangkit listrik, pengimbuhan (*recharge*) air pada cekungan air tanah serta penahan intrusi air asin.
- e. Bermanfaat sebagai usaha perikanan darat, pariwisata maupun sumber irigasi pertanian.

Situ yang memenuhi kondisi ekologi hidrologis yang baik adalah situ dengan daerah tangkapan/sumber airnya yang baik, sehingga menjamin ketinggian air pada saat musim hujan dan saat musim kemarau memiliki perbedaan fluktuasi muka air yang tidak terlalu tinggi, selain itu tidak terjadi penyusutan luasan kawasan situ dengan disertai daerah sempadan yang ditumbuhi pepohonan serta terjaga dari pencemaran limbah dan kondisi bangunan air yang terjaga dan terawat (KLH, 2007).

Didalam suatu perencanaan pengembangan dan pengelolaan situ harus diidentifikasi dan dipertimbangkan beberapa faktor-faktor sebagai berikut (PSDA,.2003) yaitu :

- a. Fungsi Situ yang berupa : sebagai sumber air baku (minum, mandi dan cuci), irigasi pertanian, pengendali banjir dan fungsi ekonomi lainnya (rekreasi, perikanan, dan lain-lain).
- b. Kapasitas/daya tampung situ dengan kualifikasi : besar dengan luas lebih dari 10 Ha; sedang dengan luas 2-10 Ha; dan kecil dengan luas kurang dari 2 Ha
- c. Instansi yang menangani, antara lain : pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan investor swasta.
- d. Kondisi fisik situ, diidentifikasi dengan indikator kuantitatif dan kualitatif fisik situ, luasan situ berkurang, daya tampung air kecil, tidak terawat dan air situ tercemar, berupa kondisi : Rusak, Terganggu dan Baik
- e. Kendala sosial di sekitar kawasan situ diantaranya dengan: tidak mendukung (indikator: alih fungsi, bangunan liar pada lokasi situ), kurang mendukung dan mendukung (indikator: batas kepemilikan lahan jelas, luas tidak berubah)
- f. Lokasi situ berada : sangat strategis, cukup strategis dan kurang strategis (dengan indikator: letak di daerah resapan air/prospek wisata, aksesibilitas)
- g. Sumber air andalan dari situ yang datang dari : Mata air, Sungai dan Hujan

Situ mempunyai manfaat secara ekologis sebagai suatu sistem penyerapan air dan tandon air serta keberlangsungan proses ekologis di dalamnya. Manfaat sosio ekonomis antara lain sebagai cadangan sumber air bersih, pengendali banjir, irigasi, sumber penyedia

protein dari sektor perikanan darat, sebagai sarana rekreasi dan sebagainya. Biasanya peruntukan penggunaan situ-situ di Jabodetabek sangat bervariasi umumnya sebagai air bersih (untuk mandi dan cuci), perikanan budidaya darat dan non budidaya/tangkap, irigasi pertanian dan tempat wisata air.

Situ adalah suatu wadah genangan air diatas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, dengan sumber air yang berasal dari air tanah dan/ atau air permukaan. Sebagai bagian dari siklus hidrologis, situ merupakan salah satu bentuk kawasan lindung setempat (non-hutan). Situ memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai tempat parkir air dan kawasan resapan air, sehingga dapat mengurangi volume air permukaan (run off) yang tidak tertampung (penyebab banjir). Disamping itu, situ dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, pengimbuhan (recharge) air pada cekungan airtanah, cadangan air bersih, perikanan darat, sarana rekreasi maupun wisata alam.

Bertolak dari pentingnya fungsi situ baik secara ekologis maupun sosio-ekonomi, maka kegiatan pengelolaan situ perlu dilakukan secara bijaksana, agar kelestarian situ dapat dijaga dan dipertahankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengelolaan situ adalah perlunya penetapan **sistem zonasi dan sempadan situ**, agar kegiatan yang dikembangkan di kawasan situ, tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fungsi utama situ itu sendiri.

Penetapan sistem zonasi situ pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kegiatan pada zona-zona tertentu disekeliling situ, agar kualitas fisik maupun kualitas air situ dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu maksud dari penentuan sistem zonasi selain untuk menentukan dan memperjelas batas masing-masing zona pemanfaatan situ, juga bertujuan untuk mendayagunakan fungsi/potensi situ secara lestari.

Seiring dengan penetapan zonasi, maka **penetapan sempadan situ** merupakan aspek lainnya yang juga harus ditata. Mengacu pada ketentuan perundang undangan yang menetapkan situ sebagai kawasan lindung (Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung) maka jarak sempadan ekosistem situ adalah 50-100 m, sedangkan untuk kawasan mata air mempunyai sempadan hingga radius 200 m.

2.8 Kebijakan Dan Strategi Dasar Pengelolaan Situ

Kebijakan pengelolaan situ ditetapkan dengan tujuan untuk:

- Perlindungan dan peningkatan fungsi situ,
- Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan

- Pemulihan pencemaran dan kerusakan Situ

Strategi dasar pengelolaan situ merupakan panduan untuk perumusan rencana kegiatan, bagi penanganan permasalahan situ. Berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakan situ, (situ kondisi baik, situ kondisi terganggu dan situ kondisi rusak¹), ditetapkan strategi pengelolaan situ berupa:

1) Strategi peningkatan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem

Strategi ini dilatarbelakangi permasalahan terbatasnya data dan informasi situ. Padahal data merupakan faktor penting untuk merumuskan rencana kegiatan pengelolaan situ. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Strategi peningkatan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem adalah mengumpulkan dan menganalisa berbagai data / informasi yang akurat tentang kondisi situ,

Kegiatan-kegiatan pokok yang terkait dengan strategi ini antara lain:

- a. Inventarisasi data situ
- b. Pengkajian dan penelitian situ berupa pengumpulan data dan informasi tentang :
 - 1 Penetapan luas dan status situ
 - 2 Status perlindungan situ,
 - 3 Tingkat kerusakan situ dan tataguna lahan kawasan sekitar situ,
 - 4 Pengkajian permasalahan pengelolaan situ
 - 5 Informasi pemantauan dan evaluasi kondisi situ

¹ klasifikasi tingkat kerusakan situ :

- Situ kondisi baik, yaitu situ sebagai daerah resapan air masih berfungsi dengan baik dan kualitasnya sesuai dengan peruntukannya
- Situ Kondisi terganggu, yaitu situ sebagai daerah resapan air fungsinya sudah tidak optimal (berkurang) dan kualitas airnya tidak sesuai dengan peruntukannya
- Situ Kondisi rusak, yaitu apabila situ sudah hilang / berubah fungsi menjadi peruntukan lainnya.

(Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup)

2) Strategi penyadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan

Strategi ini dilatarbelakangi belum memadainya perhatian masyarakat pada kelestarian situ, dan masih lemahnya kapasitas dan koordinasi antar instansi pemerintah pengelola situ. Untuk itu, strategi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan fungsi situ, sekaligus meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan situ. Kegiatan-kegiatan pokok yang terkait dengan strategi ini antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi antar instansi
- b. Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan
- c. Sosialisasi
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya situ

3) Strategi Peningkatan Upaya revitalisasi / Rehabilitasi Situ

Strategi ini bertujuan memperbaiki dan mengembalikan fungsi situ yang rusak akibat pendangkalan, alih fungsi, eutrofikasi dan pencemaran. Untuk itu kegiatan rehabilitasi dan atau revitalisasi situ merupakan fokus utama dari strategi ini. Kegiatan-kegiatan pokok yang terkait dengan strategi ini antara lain berupa:

- a. Pengamanan situ
- b. Identifikasi tingkat kerusakan situ
- c. Program / kegiatan revitalisasi
- d. Pengendalian dan pelarangan alih fungsi situ untuk peruntukan lainnya

2.9 Konsep Dasar Pengelolaan Situ

Kegiatan pengelolaan situ pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang melingkupi sebuah situ. Merujuk pada kebijakan dan strategi dasar pengelolaan situ, maka “**idealnya**”, kegiatan pengelolaan situ dilakukan melalui tahapan :

1. Tahapan Re-identifikasi situ

Tahapan ini dimaksudkan untuk mendata ulang kondisi umum situ, terutama terkait dengan data :

- Jumlah situ,
- Lokasi situ, luasan dan kedalaman situ
- Status kepemilikan lahan.
- Tata guna lahan disekitar situ

Identifikasi ulang ini perlu dilakukan mengingat data-data situ yang ada saat ini diperoleh dari data sekunder yang sudah lama, sehingga diperkirakan sudah tidak lagi akurat. Salah satu contoh perlunya re-identifikasi data situ antara lain ditunjukkan dari adanya perbedaan jumlah, nama, luas, kedalaman maupun lokasi situ, dari berbagai laporan baik dari versi instansi pemerintah, masyarakat ataupun lembaga penelitian/konsultan. Terdapatnya perbedaan data-data ini perlu diklarifikasi melalui survey lapangan.²

2. Tahapan Analisa Kondisi Situ

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara detail, kondisi situ dari aspek fisik, ekologi, hidrologi, sumberdaya air, ekonomi dan sosial budaya. sehingga dapat diketahui, apakah situ dalam kondisi baik, terganggu atau rusak. (Terlampir beberapa contoh model analisa untuk penentuan apakah situ dalam kondisi baik, terganggu atau rusak.

Tabel 2.4 Analisa Kondisi Situ

**Penentuan Tingkat kerusakan situ
berdasarkan persentase tutupan vegetasi air**

Parameter	% penutupan permukaan air oleh tanaman air	Klasifikasi Kerusakan
Tumbuhan air	< 25	Baik/Normal
	25 - < 50	Sedang
	50 - 75	Rusak
	> 75	Rusak Parah

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup

**Penentuan Tingkat Kerusakan Suatu Perairan Situ
Berdasarkan Kandungan coli tinja (fecal soliform) dan total
coliform (Merujuk pada PP. No.82 tahun 2001)**

Parameter Mikrobiolog	satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fekal Coliform	MPN/100 ml	100	1000	2000	2000	Untuk pengeolahan air secara konvesioanl, fekal coliform \leq 2000 dan total coliform < 1.000 MPN/100 ml
Total Coliform	MPN/100 ml	1000	50000	10.000	10.000	

Sumber: OECD, 1970-1980

²jumlah situ di Kota Tangerang berdasarkan versi laporan instansi pemerintah kota adalah sebanyak 9 buah situ, sementara laporan konsultan Departemen PU berdasarkan hasil interpretasi citra satelit, menunjukan setidaknya ada 80 situ (data terlampir). Adanya perbedaan data ini memerlukan tinjauan lapangan untuk memastikan jumlah situ yang sebenarnya terdapat di Kota Tangerang.

3. Tahapan Usulan Rencana Kegiatan

Tahapan ini pada dasarnya merupakan sinkronisasi hasil analisa kondisi situ (kondisi baik- terganggu- rusak)) dengan kebijakan dan strategi dasar pengelolaan situ. Tujuannya, agar rencana kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan yang tepat sasaran sehingga menunjang pengelolaan situ yang lestari dan berkelanjutan. Secara skematik, keterkaitan /sinkronisasi antara kondisi situ-kebijakan-strategi dan usulan rencana kegiatan adalah seperti tabel dibawah ini

Tabel 2.5

**Matrik Keterkaitan antara
Kondisi Situ- Kebijakan-Strategi**

Nama situ dan Analisa kondisi situ*	Kebijakan Dasar	Strategi Dasar	Usulan kegiatan
Baik	Perlindungan dan peningkatan fungsi situ	1 Peningkatan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan luas dan status situ • Status perlindungan situ, • Tingkat kerusakan situ dan tataguna lahan kawasan situ, • Pengkajian permasalahan pengelolaan situ • Informasi pemantauan dan evaluasi kondisi situ 2 Penyadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi antar instansi • Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan • Sosialisasi • Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya situ 3 Peningkatan Upaya revitalisasi / Rehabilitasi Situ <ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan situ • Identifikasi tingkat kerusakan situ • Program / kegiatan revitalisasi • Pengendalian dan pelarangan alih fungsi situ untuk peruntukan lainnya 	
Terganggu	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan situ		
Rusak	Perbaikan dan pengembalian fungsi situ		

Sumber : <http://www.scribd.com/doc/61752553/KONSEP-PENGELOLAAN-SITU>

2.10 Teknik Analisis

a) Metode Perbandingan Luasan RTH antara Eksisting dan Peraturan

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dilakukan perhitungan dan analisis terhadap kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas kebutuhan RTH didasarkan pada Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007,

yang mensyaratakan luas RTH minimal 30% dari total luas wilayah kota. Proporsi RTH berdasarkan kepemilikan adalah 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Sedangkan untuk menentukan luas RTH dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar luas RTH per penduduk. Kebutuhan RTH kota per penduduk ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, yaitu $20\text{m}^2/\text{penduduk}$

b) Metode Skoring Untuk Menilai Kualitas Situ

Menurut Rahman (2010) analisis ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas situ berdasarkan 7 (tujuh) parameter penilaian berupa penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir, kedalaman waktu musim hujan, penurunan muka air pada saat musim kemarau, batas situ berikut sempadan situ, keberadaan bangunan air, prosentase tutupan vegetasi air/gulma dan kualitas air

Tabel 2.6 Kriteria dan Indikator Penilaian Kualitas Situ

KRITERIA ASPEK	PARAMETER	KONDISI PARAMETER	NILAI BOBOT
Badan Situ	Penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir	Tinggi (> 25 %)	1
		Sedang (5 - 25 %)	2
		Rendah (< 5 %)	3
	Kedalaman musim hujan	Dangkal (< 2 m)	1
		Sedang (2 - 5 m)	2
		Dalam (> 5 m)	3
	Penurunan muka air pada musim kemarau	Tinggi (> 50 %)	1
		Sedang (25 - 50 %)	2
		Rendah (< 25 %)	3
Batas-batas Situ	Sempadan	Tidak ada	1
		Ada, tidak jelas, sebagian sempadan beralih ke penggunaan lain (ladang, rumah,dll)	2
		Ada, jelas, sempadan relatif hijau	3
Bangunan Air	Cekdam & Pintu Air	Tidak ada	1
		Ada, tidak berfungsi	2
		Ada, berfungsi baik	3
Vegetasi Air	Prosentase tutupan	> 50 %	1
		25 - 50 %	2
		< 25 %	3
Kualitas Air	Baku Mutu air	sesuai baku mutu air kelas IV	1
		sesuai baku mutu air kelas III	2
		sesuai baku mutu air kelas I & II	3
	Total Nilai Bobot Tertinggi		21

Sumber : Rahman, 2010

Dari hasil penilaian kriteria indikator masing-masing situ lalu dijumlahkan penilaiannya agar dihasilkan kelas kualitas situ yang dibagi menjadi tiga kelas yaitu Rusak, Terganggu dan Baik seperti terlihat didalam Tabel dibawah ini tentang Penilaian Kualitas Situ.

Tabel 2.7 Penilaian Kualitas Situ

TOTAL NILAI BOBOT	KUALITAS SITU
7 - 11	Buruk/Rusak
12 - 16	Terganggu
17 - 21	Baik

Sumber : Rahman, 2010

Namun pada tabel skoring yang digunakan oleh kelompok kami, hanya menggunakan penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir, sempadan, cek dam dan pintu air, baku mutu air dan dikarenakan adanya kekurangan data pada kondisi setiap situ yang ada maka beberapa penilaian yang ada pada tabel sesungguhnya dikurangi pada kondisi situ yang tidak dapat di temukan sehingga hanya menghasilkan 4 penilaian dan kelompok kami memberikan bobot nilai baru pada tabel untuk memberikan nilai yang sesuai pada kondisi dan data pada setiap situ.

Tabel 2.8 Bobot Penilaian Yang Dipakai

TOTAL NILAI BOBOT	KUALITAS SITU
4-6	Buruk/Rusak
7-9	Terganggu
10-12	Baik

Sumber : Rahman, 2010 dengan modifikasi

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1 Kondisi Geografis

Daerah penelitian studi ini terletak di Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan luas wilayah sebesar 15.393 Ha. Memiliki 13 Kecamatan, 104 Kelurahan, 972 RW dan 4.323 RT. Kota ini memiliki satu Bandara yaitu Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi Bandara Internasional utama di Indonesia. Letak Kota Tangerang secara geografis berada antara 106°20'-106°43' BT 6°00'-6°00'-6°20' LS. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
- Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta.

Secara administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Tangerang, Karawaci, Batuaceper, Neglasari, Cipondoh, Pinang, Ciledug, Karang Tengah, Larangan, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, dan Kecamatan Benda. Pada umumnya ketinggian tempat di wilayah Kota Tangerang berada pada 10 – 18 m di atas permukaan laut (BPS, 2009).

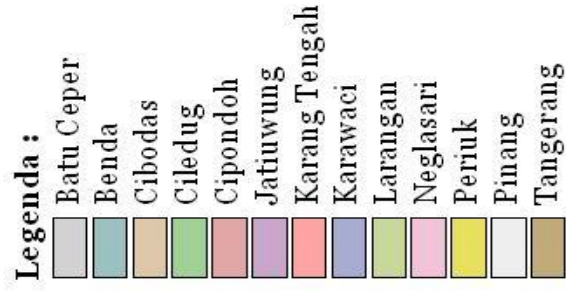
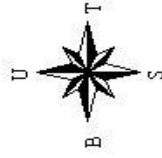
3.2 Kondisi Fisik

3.2.1 Kondisi Topografi

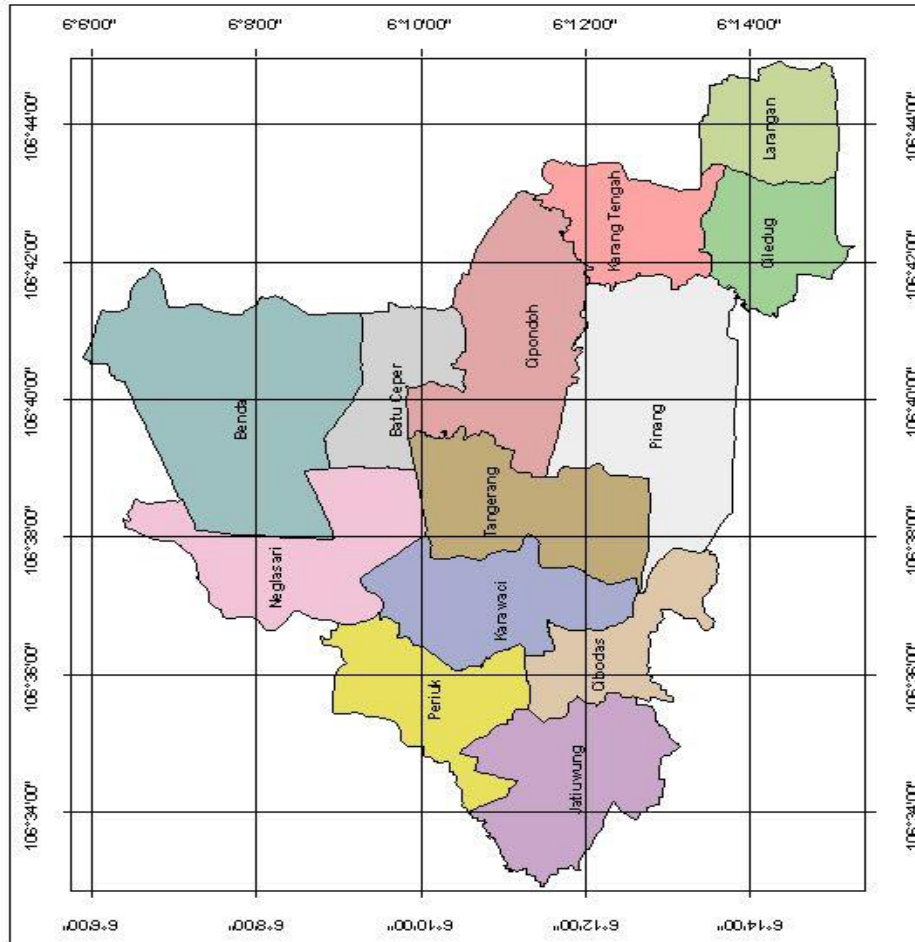
Wilayah Kota Tangerang berada pada posisi 10-30 meter di atas permukaan laut. Bagian utara memiliki ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut seperti Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batuaceper dan Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian rata-rata 30 meter di atas permukaan laut seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang memiliki tingkat kemiringan tanah 0-30% dan sebagian kecil (di bagian selatan kota) tingkat kemiringan tanahnya antara 3-8% berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.

**PETA ADMINISTRASI KECAMATAN
KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

Skala 1:100.000



Sumber:
Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000, Bakosurtanal, 2001



3.2.2 Keadaan Geologi

Secara geologi Kota Tangerang termasuk dalam Cekungan Jakarta bagian Barat, yang tersusun oleh:

- Endapan alluvium pantai
- Endapan delta
- Sebagian tersusun dari material gunung api yang berada pada suatu tinggian struktur

Dilihat dari sebaran jenis tanah, pada umumnya di Kota Tangerang berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan (cocok untuk pertanian atau perkebunan).

3.2.3 Jenis Tanah dan Batuan Induk

Kondisi geologi Kota Tangerang berdasarkan interpretasi dari Peta Geologi lembar Jakarta, terbentuk oleh Tuf Banten yang merupakan batuan vulkanik dan aluvial (Suhendar, 2005). Tuf Banten (QTvb) tersusun dari tuf, tuf batu apung dan batu pasir tufaan, sedang endapan aluvial (Qa) terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah berada di sepanjang Sungai Cisadane, Kali Angke, Kali Sabi, Kali Ciracab, Situ Cipondoh dan di bagian utara Kota Tangerang. Kipas Aluvial (Qav) yang terdiri dari tuf halus berlapis, tuf pasir yang berselingan dengan tuf konglomeratan mengisi wilayah bagian utara Kota Tangerang sekitar Bandara Soekarno-Hatta (Kecamatan Benda).

Berdasarkan Peta Tanah Semi Detail Daerah Tangerang dan Sekitarnya (Jabotabek II) Skala 1:50.000 (Lembaga Penelitian Tanah, 1980), jenis tanah di lokasi penelitian adalah Aluvial Kelabu, Kompleks Aluvial Coklat Kekelabuan dan Aluvial Kelabu, Glei Humus Rendah, Asosiasi Podzolik Coklat Kekuningan dan Hidromorf Kelabu, Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan dan Laterit Air Tanah, Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan dan Laterit Air memperlihatkan jenis tanah, tekstur dan bahan induk di lokasi penelitian.

3.2.4 Hidrologi

Ketersediaan air di Kota Tangerang awalnya berasal dari sumur-sumur dangkal dengan kualitas yang aman untuk digunakan sebagai air minum. Terdapat tiga jenis sumber air di Kota Tangerang, yaitu sungai, PDAM dan air tanah dalam (*deep well*). PDAM digunakan sebagai penyedia air utama bagi masyarakat Kota Tangerang. Sumber air PDAM ditampung di *reservoir* penampung air bersih untuk kemudian disalurkan langsung ke area pelayanan masing-masing

tanpa proses pengolahan. Sedangkan air yang berasal dari sungai Angke sungai cirarab dan sungai Cisadane ditampung di *reservoir* terlebih dahulu untuk kemudian diolah untuk di gunakan atau langsung di gunakan tanpa melalui proses pengolahan oleh masyarakat Kota Tangerang.

3.2.5 Rawan Bencana

Berdasarkan hasil kaaian, Bencana yang mengancan Kota Tangerang dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut meliputi, antara lain: tanah longsor, puting beliung, banjir, kekeringan, gempa bumi, konflik sosial, wabah penyakit, kebakaran, pencemaran lingkungan

Tabel. 3.1 Analisis Resiko Bencana di Kota Tangerang

No	Jenis Bencana	Ancaman (poin)	Kerentanan (poin)	Kemampuan (poin)	Resiko (poin)	Tingkat Resiko
1	Gempa bumi	150	400	400	150	Sangat rendah
2	Tanah longsor	240	250	400	150	Sangat rendah
3	Banjir	500	500	400	625	Sangat tinggi
4	Kebakaran	480	475	400	570	Sangat tinggi
5	Puting beliung	400	400	400	400	Tinggi
6	Kekeringan	380	475	400	451,25	Tinggi
7	Wabah penyakit	380	425	400	403,75	Tinggi
8	Konflik sosial	350	375	400	328,125	Sedang
9	Sampah dan Limbah	400	425	400	425	tinggi

Sumber : <http://litbang.tangerangkota.go.id>

Keterangan : 100-200 : Sangat rendah , 200-300: Rendah , 300 -400: Sedang, 400-500 : Tinggi , >500 : Sangat Tinggi

3.2.6 Iklim

Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2003-2008 diketahui bahwa curah hujan per tahun tertinggi terjadi pada tahun 2007 (1.951 mm/tahun) dengan jumlah hari hujan 127 hari. Rata-rata kelembaban udara setiap tahun meningkat hingga tahun 2005,

kemudian menurun pada tahun 2006 dan meningkat lagi sampai tahun 2008. Sedangkan rata-rata temperatur udara dari tahun 2003 sampai 2008 cenderung stabil ($\pm 27^{\circ}\text{C}$).

Tabel 3.2 Curah hujan, kelembaban udara dan temperatur di Kota Tangerang

Tahun	Banyak Hari Hujan (hari)	Banyak Curah Hujan (mm)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata-Rata Temperatur Udara ($^{\circ}\text{C}$)
2008	137	1.746	79,67	27,31
2007	127	1.951	78,30	27,39
2006	111	1.301	78,00	27,16
2005	133	1.804	81,92	27,46
2004	111	1.948	81,33	27,46
2003	138	1.656	58,08	27,07

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika (BPS, 2009)

3.3 Penggunaan Lahan

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Botabek dengan luas wilayah 18.378 Ha. Dari luas wilayah tersebut pertumbuhan fisik kota ditunjukkan oleh besarnya kawasan terbangun kota, yaitu seluas 10.127,231 Ha (57,12 % dari luas seluruh kota), sehingga sisanya sangat strategis untuk dapat dikonsolidasi dengan baik ke dalam wilayah terbangun kota yang ada melalui perencanaan kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Data terakhir menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kota Tangerang meliputi:

1. Pemukiman (5.988,2 Ha)
2. Industri (1.367,1 Ha)
3. Perdagangan dan Jasa (608,1 Ha)
4. Pertanian (4.467,8 Ha)
5. Lain-lain (819,4 Ha)
6. Belum terpakai (2.66,4 Ha)
7. Bandara Soekarno - Hatta (1.816,0 Ha)

Pola penggunaan lahan di Kota Tangerang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berkaitan dengan zoning di Kota Tangerang, pusat kota ditetapkan di Kecamatan Tangerang. Kawasan pengembangan terbatas di bagian Utara (Kecamatan Benda dan Batuceper) masih mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lama. Kecamatan Batuceper masih diarahkan untuk kegiatan perdagangan, industri dan perumahan susun. Kecamatan Benda yang wilayahnya meliputi sebagian Bandara Internasional Soekarno - Hatta diarahkan sebagai ruang terbuka hijau dan buffer (pengaman) bandara, yang masih konsisten dengan RTRW sebelumnya. Sedangkan Kecamatan Ciledug tetap diarahkan untuk kegiatan perumahan tapi dengan penegasan yang lebih jelas antara skala menengah dan kecil. Kecamatan Jatiuwung di bagian Barat Kota Tangerang diarahkan untuk kegiatan industri dengan pengembangan terbatas, serta permukiman penunjang industri. Kawasan tersebut tidak diarahkan untuk penambahan industri baru tapi untuk perluasan kegiatan yang sudah ada saja.

Peta Penggunaan Lahan

LEGENDA

Jalan

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kereta Api

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Wilayah Studi

Lokasi Situ

- Situ

Ruang Terbuka Hijau

- Privat
- Publik


Penggunaan Lahan

- Fungsi Lain
- Area Terbangun

SUMBER

- Batas administrasi : Peta RTRW Kota Tangerang
- Lokasi situ : Dinas Sumber Daya Air
- RTH : Citra Satelit

SKALA 1 : 80.000



UNIVERSITAS TRISAKTI
Fakultas Arsitektur Lansekap & Teknik Lingkungan
Jurusan Planologi

1. Batas administrasi : Peta RTRW Kota Tangerang
2. Lokasi situ : Dinas Sumber Daya Air
3. RTH : Citra Satelit



UNIVERSITAS TRISAKTI
Fakultas Arsitektur Lansekap & Teknik Lingkungan
Jurusan Planologi



3.4 Kondisi Penduduk

3.4.1 Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2010

No	Kecamatan	Penduduk			
		Laki - Laki	Perempuan	Laki – Laki + Perempuan	Sex Ratio
1	Ciledug	75.511	71.943	147.454	104,96
2	Larangan	83.648	80.789	164.437	103,54
3	Karang Tengah	60.123	58.785	118.908	102,28
4	Cipondoh	108.701	105.668	214.369	102,87
5	Pinang	81.460	78.908	160.368	103,23
6	Tangerang	78.583	73.808	152.391	106,47
7	Karawaci	85.411	84.263	169.674	101,36
8	Jatiuwung	63.880	56.626	120.506	112,81
9	Cibodas	72.013	70.766	142.779	101,76
10	Priuk	66.273	62.777	129.050	105,57
11	Batu Ceper	45.567	43.814	90.381	106,28
12	Neglasari	53.858	49.598	103.456	108,59
13	Benda	43.610	40.332	83.942	108,13
Tangerang		919.638	878.077	1.797.715	104,73

Sumber : BPS Kota Tangerang (2010)

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dari data yang di dapat oleh BPS kota Tangerang yang didapat, bisa dilihat bahwa Penduduk laki – laki di Kota Tangerang lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 919.638 jiwa

3.4.2 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kota Tangerang sementara adalah 1.797.715 orang, yang terdiri atas 919.638 laki-laki dan 878.077 perempuan. Kecamatan Cipondoh, Karawaci dan Larangan merupakan 3 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni masing - masing berjumlah 214.369 orang, 169.674 orang dan 164.437 orang. Sedangkan Batu Ceper dan Benda merupakan 2 kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu masing - masing 90.381 orang Dan 83.942 orang.

Tabel 3.4 Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Ciledug	87,3	147.454	1.689,05
2	Larangan	90,1	164.437	1.825,05
3	Karang Tengah	104,4	118.908	1.138,97
4	Cipondoh	178,5	214.369	1.200,95
5	Pinang	215,4	160.368	744,51
6	Tangerang	167,4	152.391	910,34
7	Karawaci	13,41	169.674	12.652,80
8	Jatiuwung	143,7	120.506	838,59
9	Cibodas	84,9	142.779	1.681,73
10	Priuk	95,1	129.050	1.356,99
11	Batu Ceper	115,6	90.381	781,84
12	Neglasari	160,3	103.456	645,39
13	Benda	59,1	83.942	1.420,34

Sumber : BPS Kota Tangerang (2010)

3.4.3 Proyeksi Penduduk

Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2% dapat dihitung proyeksi penduduk pada tahun 2015 yaitu 1.981.701 jiwa, tahun 2020 yaitu 2.183.440 jiwa, 2025 yaitu 2.405.717 jiwa, 2030 yaitu 2.650.622 jiwa, dan pada tahun 2032 yaitu .755.428 jiwa. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.5 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tangerang

		2008	2009	2010	Rata2 Pertumbuhan	2015	2020	2025	2030	2032
1	Ciledug	108,780	136,655	147,023	0.02	161,990	178,481	196,650	216,670	225,237
2	Larangan	137,621	151,879	163,901	0.02	180,586	198,970	219,226	241,543	251,094
3	Karang Tengah	101,488	109,931	118,473	0.02	130,534	143,822	158,463	174,595	181,499
4	Cipondoh	162,419	197,906	216,346	0.02	238,370	262,637	289,373	318,832	331,439
5	Pinang	133,743	148,222	160,206	0.02	176,515	194,485	214,283	236,098	245,433
6	Tangerang	129,489	137,524	152,145	0.02	167,634	184,699	203,501	224,218	233,084
7	Karawaci	163,195	156,465	171,317	0.02	188,757	207,973	229,145	252,472	262,455
8	Cibodas	131,373	111,249	142,479	0.02	156,984	172,965	190,573	209,973	218,276
9	Jatiuwung	117,688	127,824	120,216	0.02	132,454	145,938	160,795	177,164	184,169
10	Periuk	108,482	119,249	129,384	0.02	142,555	157,068	173,057	190,675	198,214
11	Neglasari	91,346	82,607	103,504	0.02	114,041	125,650	138,442	152,535	158,566
12	Batuceper	79,535	95,538	90,590	0.02	99,812	109,973	121,169	133,504	138,782
13	Benda	66,507	77,541	83,017	0.02	91,468	100,780	111,039	122,343	127,181
Kota Tangerang		1,531,666	1,652,590	1,798,601	1.96	1,981,701	2,183,440	2,405,717	2,650,622	2,755,428

Sumber : Analisa

3.4.4 Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3.6 Pertumbuhan Penduduk

NO	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (Persen)
1	1995	1.096.916	12.09
2	1996	1.138.584	3.66
3	1997	1.180.930	3.59
4	1998	1.223.922	3.51
5	1999	1.267.547	3.44
6	2000	1.311.746	3.37
7	2001	1.354.226	3.14
8	2002	1.416.842	4.42
9	2003	1.466.577	3.39
10	2004	1.437.377	-2.03
11	2005	1.455.185	1.22
12	2006	1.481.591	1.78
13	2007	1.508.414	1.78
14	2008	1.531.666	1.52
15	2009	1.652.590	7.32

Sumber: BPS Kota Tangerang 1995-2009 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai pada tahun 1995 yaitu sebesar 12,09 persen. Sedangkan pada tahun 2004 pertumbuhan penduduk menurun drastis menjadi -2,03 persen. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran wilayah Kota Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan, sehingga jumlah penduduk di Kota Tangerang menjadi menurun.

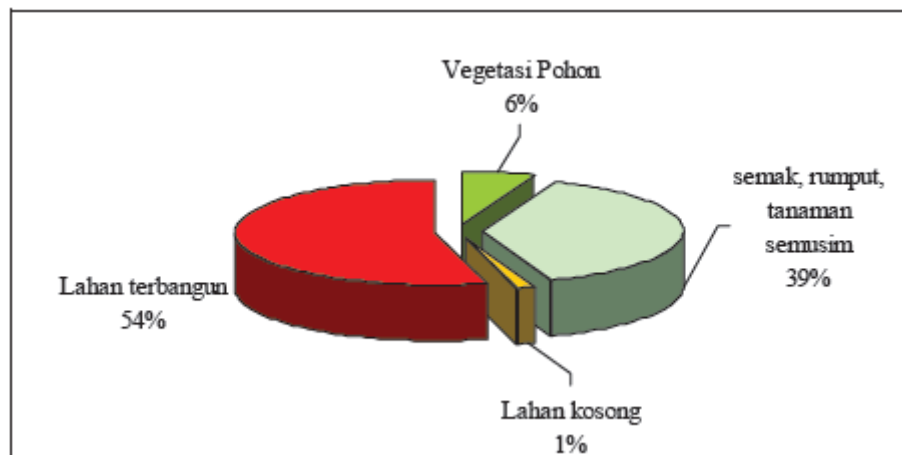
3.5 Kondisi Fisik dan Lingkungan Eksisting.

3.5.1 RTH

3.5.1.1 Kondisi RTH Eksisting berdasarkan Penutupan Lahan

Pancawati (2010) melakukan analisa penutupan lahan untuk mengetahui luas ketersediaan RTH, lokasi, dan penyebarannya. Hasil analisisnya digunakan sebagai data eksisting RTH pada Kota Tangerang. Pancawati menggunakan kenampakan citra Ikonos dan survey lapangan. Penutupan lahan di Kota Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu :

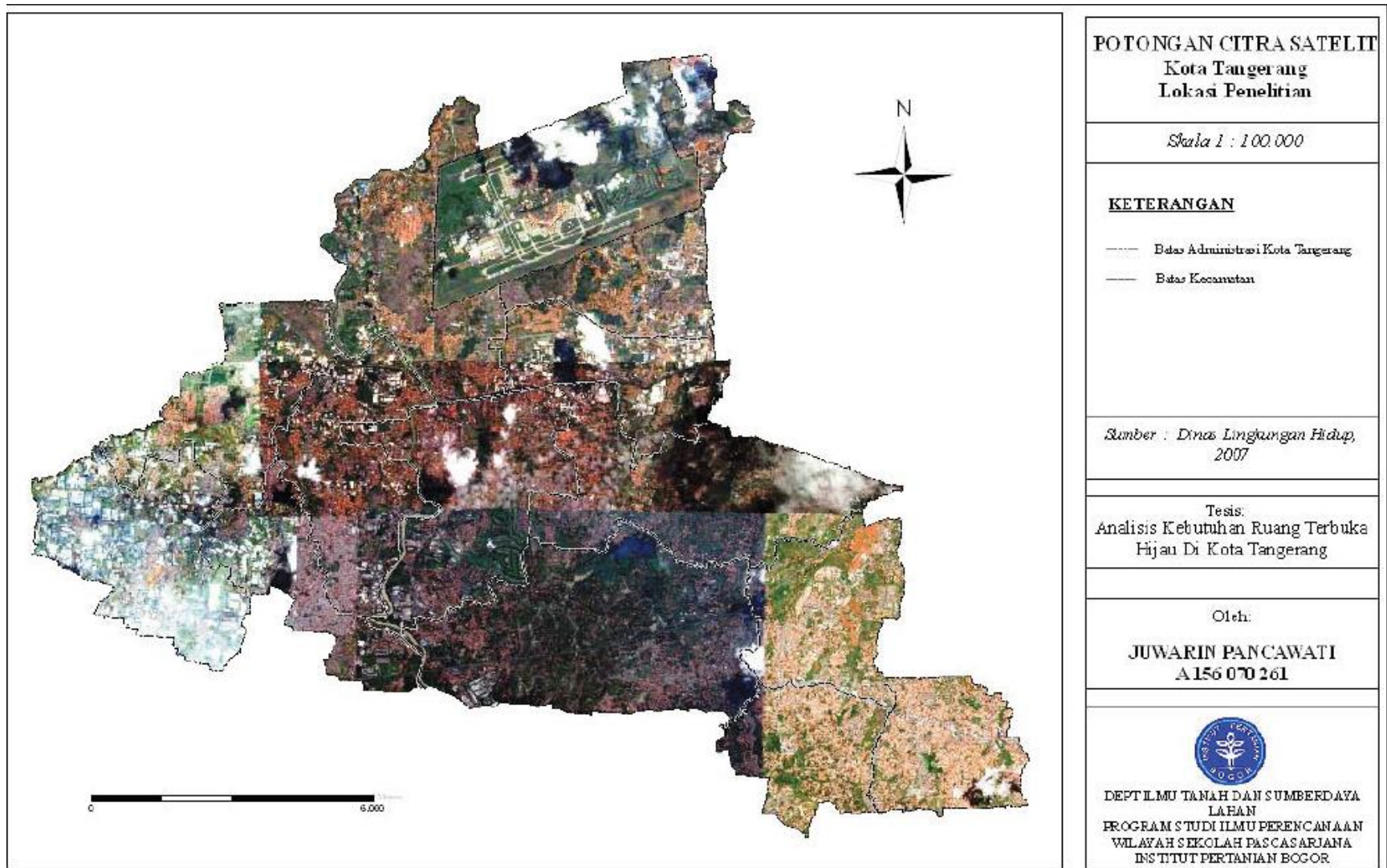
1. Lahan bervegetasi pohon atau tanaman keras (6%)
2. Lahan bervegetasi semak, rumput, dan tanaman musiman (sawah/ladang) (39%)
3. Lahan kosong atau tidak bervegetasi (1%)
4. Lahan terbangun; baik berupa permukiman, bangunan industri, bangunan infrastruktur dan bentuk lainnya (54%)



Sumber : Pancawati (2010)

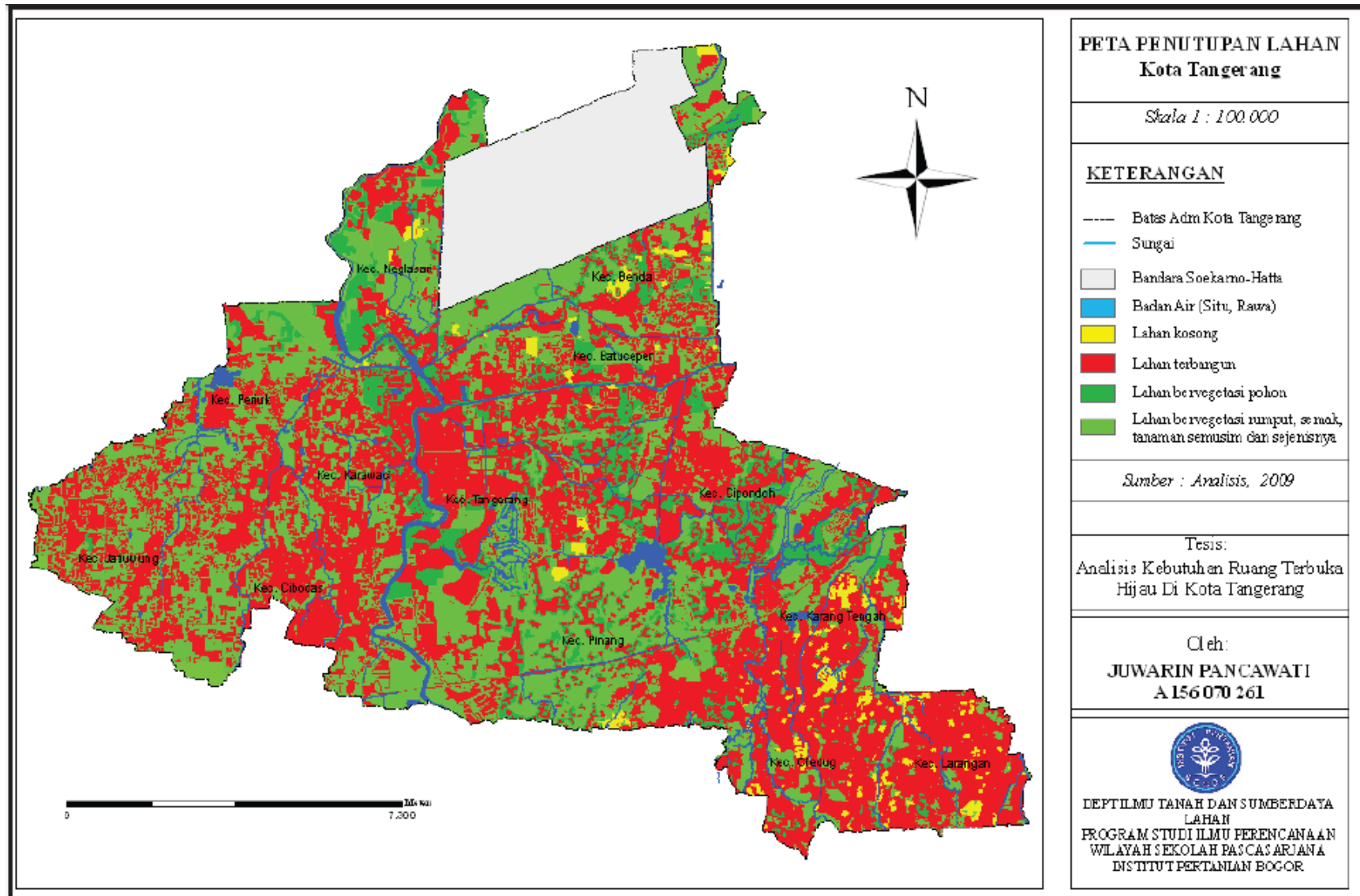
Menurut Pancawati (2010) kawasan hijau di Kota Tangerang secara umum membentuk pola terdistribusi tidak merata. Lahan bervegetasi pohon, yang dicirikan oleh tekstur yang kasar dan berwarna hijau tua sebagian membentuk pola memanjang (jalur) di sepanjang sungai, dan sebagian lainnya membentuk gerombol-gerombol kecil yang tidak saling terhubung. Lahan hijau yang lainnya berupa lahan bervegetasi semak, rumput, dan tanaman pertanian semusim membentuk pola menyebar atau terdistribusi secara tidak merata.

Gambar 3.3 Peta Citra Satelit Kota Tangerang



Sumber : Pancawati (2010)

Gambar 3.4 Peta Penutupan Lahan Kota Tangerang



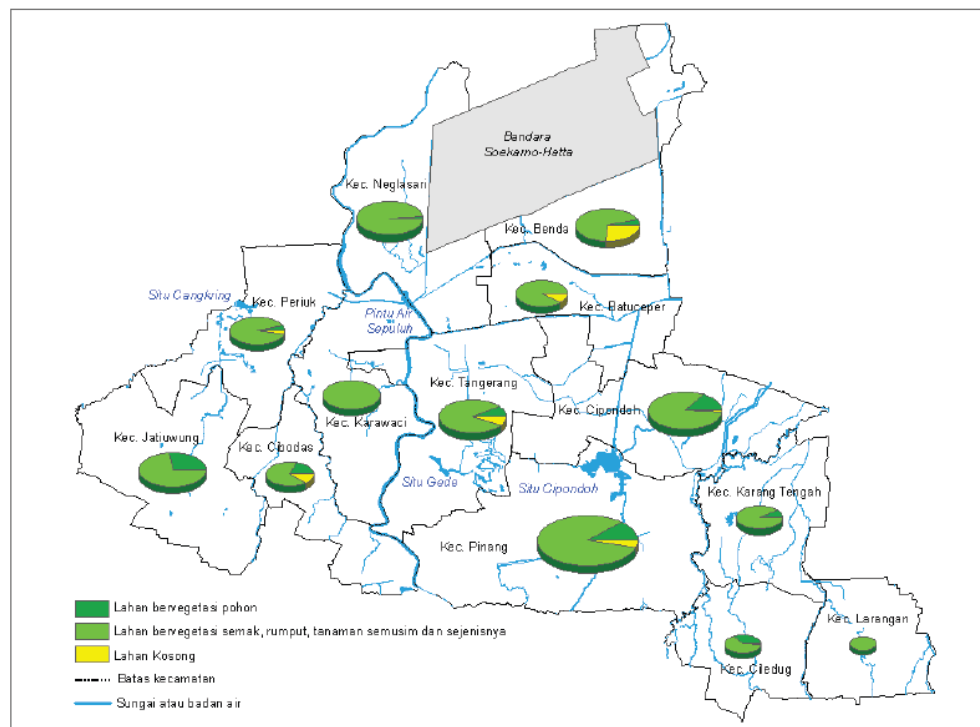
Sumber : Pancawati (2010)

Adapun luasan RTH Kota Tangerang hingga tahun 2009 adalah seperti yang terdapat pada tabel klasifikasi dan luas penutupan lahan Kota Tangerang berikut ini :

Tabel 3.7 Klasifikasi dan Luas Penutupan Lahan Kota Tangerang

Kecamatan	Klasifikasi Penutupan Lahan (hektar)				
	Bervegetasi Pohon	Semak, Rumput, tnm semusim dsb	Lahan Kosong	Lahan Terbangun	Jumlah RTH (a+b)
	A	B	C	D	
Ciledug	0,6	205,4	22,6	654,7	206,0
Larangan	5,9	101,8	37,8	668,3	107,6
Karang Tengah	67,5	259,6	42,2	640,3	327,0
Cipondoh	310,1	541,9	10,9	830,6	852,1
Pinang	222,1	1321,9	17,9	818,7	1544,1
Tangerang	188,4	510,0		859,1	698,4
Karawaci	39,4	465,6	2,5	716,3	505,0
Cibodas		367,6		515,0	367,6
Jatiuwung	7,9	701,9		776,9	708,9
Periuk	5,2	452,9		666,8	458,1
Neglasari	30,8	631,8	18,3	889,6	662,7
Batuceper	44,7	374,0	15,6	469,8	418,7
Benda	52,0	584,4	45,1	382,1	636,3
Jumlah	973,6	6518,9	212,8	8888,2	7492,5

Sumber : Pancawati, 2010



Gambar 3.5 Proporsi Ruang Terbuka di Kota Tangerang (Sumber : Pancawati, 2010)

Berdasarkan gambar peta penutupan lahan dan proporsi ruang terbuka yang penelitiannya dilakukan oleh Pancawati di atas, kawasan yang relatif masih memiliki banyak vegetasi tampak terlihat di sekitar Situ Cipondoh, di sekitar kawasan industri Jatiuwung, dan di sekitar Neglasari. Kawasan hijau di sekitar Situ Cipondoh, meliputi Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh. Berdasarkan analisa visual, kawasan hijau ini masih didominasi oleh lahan pertanian. Kegiatan pertanian di daerah ini ditunjang dengan adanya Situ Cipondoh. Selain itu di daerah ini masih banyak dijumpai pepohonan (tanaman berkayu) yang biasanya merupakan kebun atau pekarangan penduduk setempat. Pepohonan juga terlihat di sepanjang aliran Sungai Cisadane. RTH ini tidak membentuk jalur namun lebih banyak membentuk gerombol yang terpisah-pisah.

3.5.1.2 Luasan RTH Eksisting

Luasan RTH eksisting berdasarkan data lain yang didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penataan Ruang pada tahun 2011 disebutkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 RTH Publik Eksisting Kota Tangerang

No	Nama Taman	Luas		Kecamatan
		Dalam M ²	Dalam Ha	
1	Hutan Kota Cikokol	9600	0,96	Tangerang
2	Hutan Kota Daan Mogot	3000	0,3	Tangerang
3	Jalur Hijau Samping Kumatex	125	0,0125	Tangerang
4	Jalur Hijau Jl. MH. Thamrin	3800	0,38	Tangerang
5	Jalur Hijau Jl. M. Yamin	1100	0,11	Tangerang
6	Jalur Hijau Pos Polisi Yuppentek	96	0,0096	Tangerang
7	Jalur Hijau TMP Taruna	4100	0,41	Tangerang
8	Jalur Hijau Daan Mogot	16400	1,64	Tangerang
9	Jalur Hijau Bak Bunga Jl. Satria Sudirman	600	0,06	Tangerang
10	Jalur Hijau Benteng Betawi	24000	2,4	Tangerang
11	Jalur Hijau Jl. Djuanda	1120	0,112	Neglasari
12	Jalur Hijau Jl. Sudirman	250	0,025	Tangerang

13	Jalur Hijau Husein Sastranegara	14953	1,4953	Benda
14	Jalur Hijau Jl. AMD	16656	1,6656	Benda
15	Jalur Hijau Jl. Kali Perancis	24000	2,4	Benda
15	Pulau Jalan Depan BPN	500	0,05	Tangerang
17	Pulau Jalan Depan Monier	300	0,03	Tangerang
18	Pulau Jalan Depan PDAM	250	0,025	Tangerang
19	Pulau Jalan Pasar Depan Pasar Cikokol	255	0,0255	Tangerang
20	Pulau Jalan Jasunbata Kumatex	150	0,015	Tangerang
21	Pulau Jalan Reklame Cikokol	150	0,015	Tangerang
22	Pulau Jalan Tugu Jam Cikokol	150	0,015	Tangerang
23	Pulau Jalan Pot Yuppentek	64	0,0064	Tangerang
24	Pulau Jalan Simpang Lio Baru	55	0,0055	Tangerang
25	Pulau Jalan Simpang TMP Daan Mogot	35	0,0035	Tangerang
26	Pulau Jalan SMP 5	200	0,02	Tangerang
27	Pulau Jalan Kubah Merdeka	100	0,01	Tangerang
28	Pulau Jalan Simpang Tujuh	125	0,0125	Neglasari
29	Pulau Jalan Sitanala	400	0,04	Neglasari
30	Pulau Jalan Pot Kotak Cipondoh	100	0,01	Tangerang
31	Pulau Jalan Pos Kubus Cipondoh	100	0,01	Tangerang
32	Pulau Jalan Pos Polisi Cipondoh	140	0,014	Tangerang
33	Taman Angsana Cikokol	4200	0,42	Tangerang
34	Taman Depan Disnaker	2273	0,2273	Tangerang
35	Taman Depan Akses	130	0,013	Tangerang
36	Taman Depan BTN	1865	0,1865	Tangerang
37	Taman Depan Golkar	216	0,0216	Tangerang

38	Taman Jiwasraya	465	0,0465	Tangerang
39	Taman Depan Kali Cisadane	6200	0,62	Tangerang
40	Taman TMP Taruna (Taman Hoek Lio Baru)	750	0,075	Tangerang
41	Taman Adipura Daan Mogot	315	0,0315	Tangerang
42	Taman Batas Kota Daan Mogot	450	0,45	Tangerang
43	Taman Benteng Jaya	9440	0,944	Tangerang
44	Taman Dadang Suprpto	6980	0,6980	Karawaci
45	Taman Dewi Sartika	15	0,0015	Tangerang
46	Taman Pos Polisi Jl. Imam Bonjol	85	0,0085	Tangerang
47	Taman Stasiun Pemantau Cuaca	750	0,075	Karawaci
48	Taman Pojok Kiasnawi	11	0,0011	Tangerang
49	Taman Depan Gapensi	80	0,008	Tangerang
50	Taman Depan Pasar Buah Merdeka	85	0,0085	Karawaci
51	Taman Pos Model Merdeka	150	0,015	Karawaci
52	Taman BRI Jl. Petukang	150	0,015	Tangerang
53	Taman Nyi Mas Melati Perumnas	8804	0,8804	Karawaci
54	Taman Ruko Modemland	500	0,05	Tangerang
55	Median Jl. MH Thamrin	1100	0,11	Tangerang
56	Median Jl. M Yamin	825	0,0825	Tangerang
57	Median Jl. TMP Taruna	825	0,0825	Tangerang
58	Median Jl. Veteran	800	0,08	Tangerang
59	Median Jl. Satria	600	0,06	Tangerang
60	Median Jl. Satria Sudirman	500	0,05	Tangerang
61	Median Jl. Kisamaun Depan Mesjid	25	0,0025	Tangerang
62	Median Benteng Betawi	24000	2,4	Tangerang

63	Median Jl. Djuanda	1120	0,112	Tangerang
64	Median Jl. Suryadama	1108	0,118	Neglasari
65	Median Ujung Jl. Kiasnawi	60	0,006	Tangerang
66	Bak Bunga TMP Taruna	150	0,015	Tangerang
67	Bak Bunga Daan Mogot	1070	0,107	Tangerang
68	Bak Bunga Tanah Tinggi Jl Sudirman	225	0,0225	Tangerang
69	Bak Bunga Jl. Kisamaun	30	0,003	Tangerang
70	Bantaran Kali Cisadane Jl. Kalipasar	10200	1,02	Tangerang
71	Bantaran Kali Cisadane Berhias	2400	0,24	Karawaci
72	Bantaran Kali Perancis	36000	3,6	Benda
73	Bantaran Kali Cisadane Jl.GJA	2800	0,28	Karawaci
74	Bantaran Kali Mookervaart	19200	1,92	Tangerang
75	Bantaran Kali Cisadane Sangeo-Bayur	74400	7,44	Periuk
76	Plasa Jl. Satria Sudirman	1095	0,1095	Tangerang
77	Pojok SMP 5	300	0,03	Tangerang
Jumlah		342.302	34,23	0,18%

Sumber : Lokakarya P2KH, Kementerian PU

Peta Ruang Terbuka Hijau

LEGENDA

- Jalan
 - Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kereta Api
 - Sungai
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Situ
- Ruang Terbuka Hijau
 - Privat
 - Publik
 - Jalur Hijau






SUMBER

1. Batas administrasi : Peta RTRW Kota Tangerang
2. Lokasi situ : Dinas Sumber Daya Air
3. RTH : Citra Satelit

SKALA 1 : 80.000

UNIVERSITAS TRISAKTI
Fakultas Arsitektur Lansekap & Teknik Lingkungan
Jurusan Planologi

Jalan

-  Jalan Tol
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Arteri Sekunder
 Jalan Kereta Api
 Sungai

Batas Kecamatan

-
- Situ

Privat

- Publik
Jalur Hijau

1. Batas administrasi : Peta RTRW Kota Tangerang
2. Lokasi situ : Dinas Sumber Daya Air
3. RTH : Citra Satelit



UNIVERSITAS TRISAKTI
Fakultas Arsitektur Lansekap & Teknik Lingkungan
Jurusan Planologi



3.5.2 Situ

3.5.2.1 Kondisi Situ Eksisting

A. Situ Cipondoh

Situ Cipondoh berada pada wilayah Kota Tangerang, dalam dua Kecamatan yaitu Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang dengan Luas 17,91 Km² dan 21,59 Km². Sedangkan pada Kawasan Situ Rawa Cipondoh memiliki luas 125 Ha dengan batas – batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan KH. Hasyim Ashari,
- Sebelah Timur : Jalan KH. Hasyim Ashari,
- Sebelah Barat : Perumahan Cipondoh Indah,
- Sebelah Selatan : Jalan Tol Jakarta – Merak.

Situ Cipondoh merupakan danau alami yang luasnya lebih dari seratus hektar, yang berupa cekungan besar serta ditutupi tanaman liar eceng gondok. Kini Situ Cipondoh telah menjadi kawasan wisata alami yang bernaung dibawah Pemerintah Kota Tangerang, namun pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat dan dilestarikan secara swadaya masyarakat.



Permukaan Situ Cipondoh yang dipenuhi vegetasi



Penimbunan Tanah Di Sekitar Bibir Danau/Situ



Tanggul penahan air Situ Cipondoh



Peraturan Pemerintah Provinsi Banten terkait dengan Situ Cipondoh

Gambar 3.8 Kondisi Eksisting Situ Cipondoh

B. Situ Gede

Situ Gede berada pada wilayah Kota Tangerang, dalam Kecamatan Tangerang dengan luas Kecamatan 15,79 Km². Sedangkan pada Kawasan Situ Gede memiliki luas 5,4 Ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Jendral Sudirman,
- Sebelah Timur : Kecamatan Pinang,
- Sebelah Barat : Jalan MH. Thamrin,
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pinang.

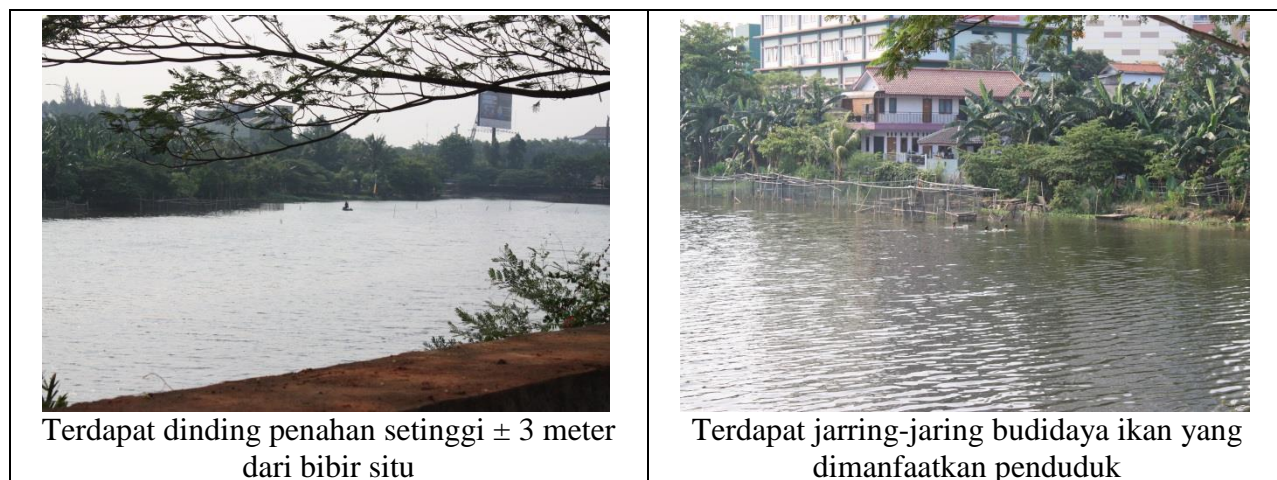
Situ Gede merupakan danau buatan yang dikelola oleh PT Modern Land sebagai tandon atau pengendali banjir kawasan permukiman di Modern Land.



Permukaan Situ Gede



Situ Gede berhadapan langsung dengan salah satu mall di Modern Land



Gambar 3.9 Kondisi Eksisting Situ Gede

C. Situ Bulakan

Situ Bulakan berada pada wilayah Kota Tangerang, dalam Kecamatan Periuk dengan luas Kecamatan 9,54 Km². Sedangkan pada kawasan Situ Bulakan memiliki luas 15 Ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang,
- Sebelah Timur : Perumahan Villa Mutiara Pluit,
- Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gebang Raya.

Situ Bulakan merupakan danau buatan yang awalnya berupa rawa tidak terurus dan dirubah menjadi situ oleh PT Sangiang Alam Permai, PT Duta Restu Alam dan PT Kartika Puja Kusuma sebagai tandon atau pengendali banjir. Situ Bulakan Berada di tengah – tengah permukiman yang di kelola oleh ketiga Pengembang tersebut.



Gambar 3.5 Kondisi Eksisting Situ Bulakan

D. Situ Cangkring

Situ Cangkring berada pada wilayah Kota Tangerang, dalam Kecamatan Periuk dengan luas Kecamatan 9,54 Km². Sedangkan pada kawasan Situ Cangkring memiliki luas 6 Ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang,
- Sebelah Timur : Nambo Jaya,
- Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gebang Raya.

Situ Cangkring merupakan danau yang dikelola oleh penggarap liar dan dijadikan tempat memancing bagi warga sekitar. Situ ini juga berfungsi sebagai tandon atau pengendali banjir bagi kawasan sekitarnya. Namun kini kondisi Situ Cangkring hampir tidak terlihat permukaannya.



Gambar 3.6 Kondisi Eksisting Situ Cangkring

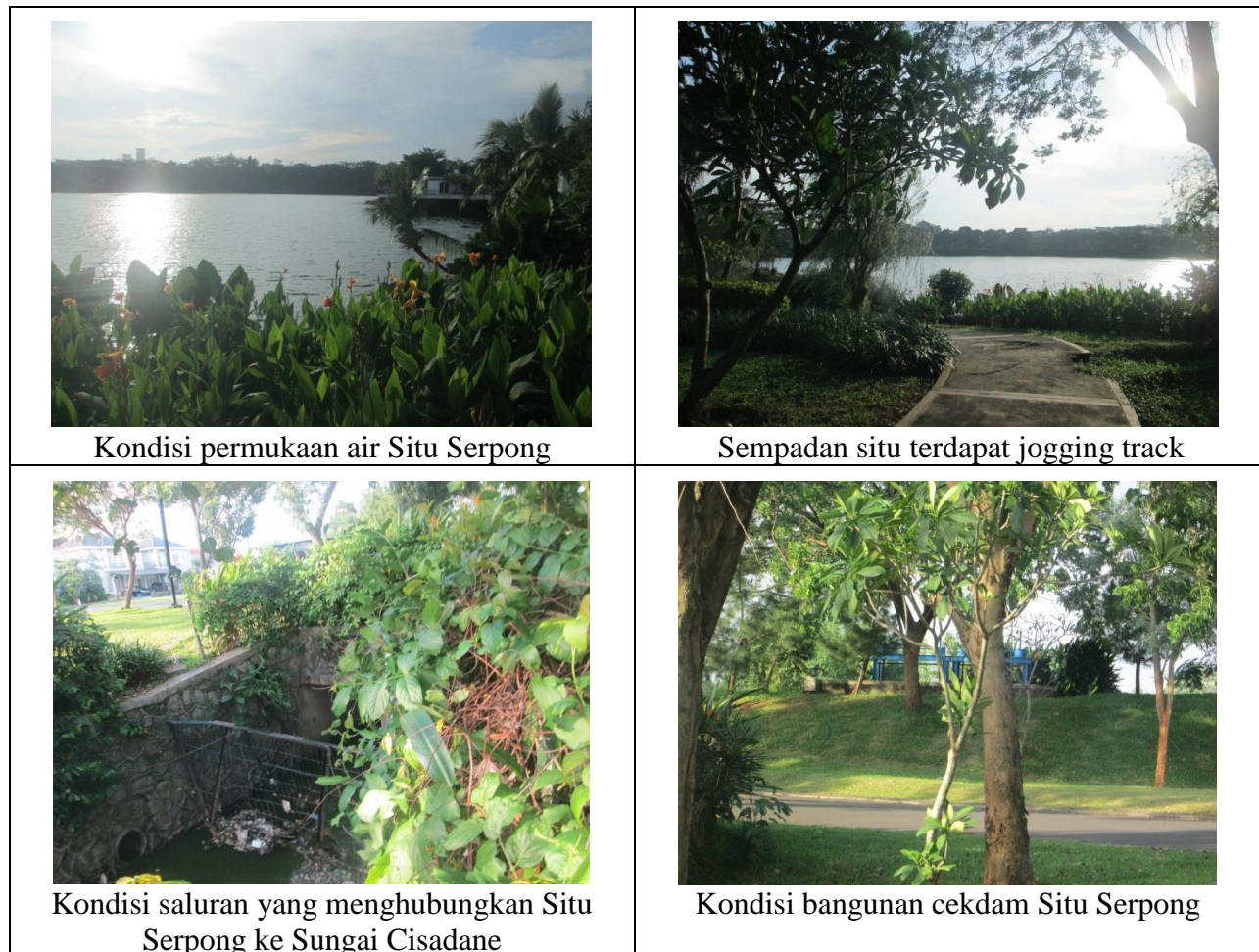
E. Situ Serpong

Situ Serpong berada pada wilayah Kota Tangerang, dalam Kecamatan Cibodas dengan luas Kecamatan 9,61 Km². Sedangkan pada kawasan Situ Serpong memiliki luas 5,8 Ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

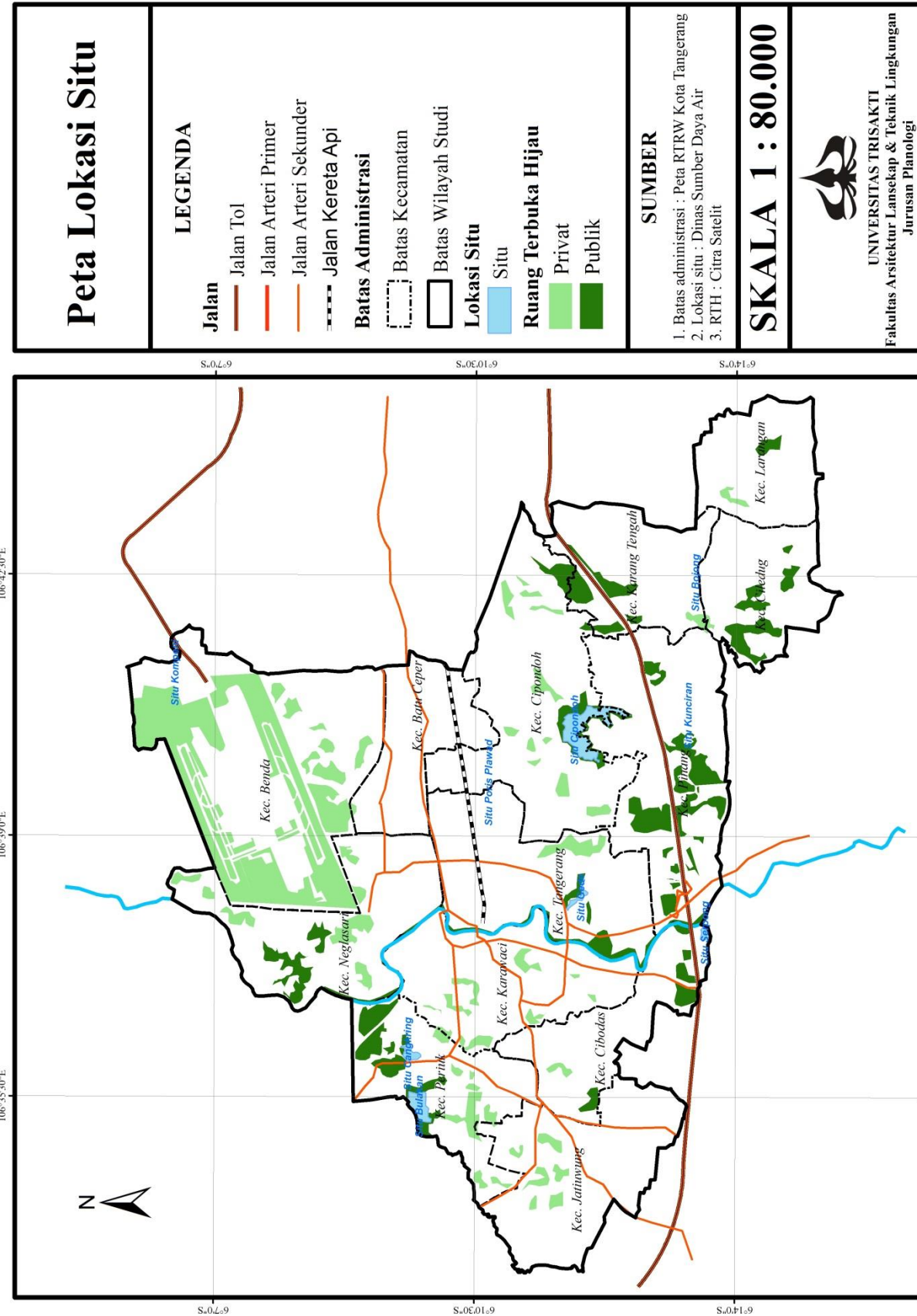
- Sebelah Utara : Jalan Tol Jakarta-Merak,
- Sebelah Timur : Sungai Cisadane dan Jalan Serpong Raya,
- Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tangerang.

Situ Serpong merupakan danau buatan yang awalnya berupa cekungan bekas galian tanah yang dirubah menjadi situ oleh PT Paramount sebagai tandon atau pengendali banjir. Situ Serpong berada di tengah – tengah perumahan Paramount Serenade Lake yang di kelola oleh

Pengembang tersebut. Secara administrasi Situ Serpong ini masuk pada wilayah Kota Tangerang yaitu Kecamatan Cibodas, Kelurahan Panunggangan Barat, namun Pengembangnya yaitu PT Paramount masuk pada wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.7 Kondisi Eksisting Situ Serpong



2.6.2.2 Luasan Situ Eksisting

Luasan Situ – situ yang berada di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Kondisi Eksisting Kota Tangerang

No	Nama Situ	Desa/Kel	Kecamatan	Pemanfaatan	Luas Semula (Ha)	Luas Sekarang (Ha)	Permasalahan
1	Situ Cipondoh	Cipondoh	Cipondoh	Reservoir	170	125	Pendangkalan, penimbunan dan ditumbuhi gulma
2	Situ Gede	Cikokol	Tangerang	Reservoir	6.8	5.4	Pendangkalan dan ditumbuhi gulma
3	Situ Bulakan	Periuk	Periuk	Reservoir	30	15	50% menjadi perumahan
4	Situ Cangkring	Periuk	Periuk	Reservoir	6.17	6	Tidak terawat dan ditumbuhi gulma
5	Situ Serpong	Kunciran	Pinang	Reservoir	6	5,8	Terkesan situ privat karena berada di dalam lingkungan perumahan

Sumber : Dinas Sumber Daya Air

2.6.2.3 Pengelolaan Situ

Situ – situ yang berada di Kota Tangerang saat ini merupakan Situ – situ yang tersisa dari 9 Situ yang pernah ada di Kota Tangerang. Beberapa Situ yang hilang terjadi karena berbagai faktor yang diantaranya adalah faktor pengelolaan yang tidak baik dan peralihan fungsi menjadi

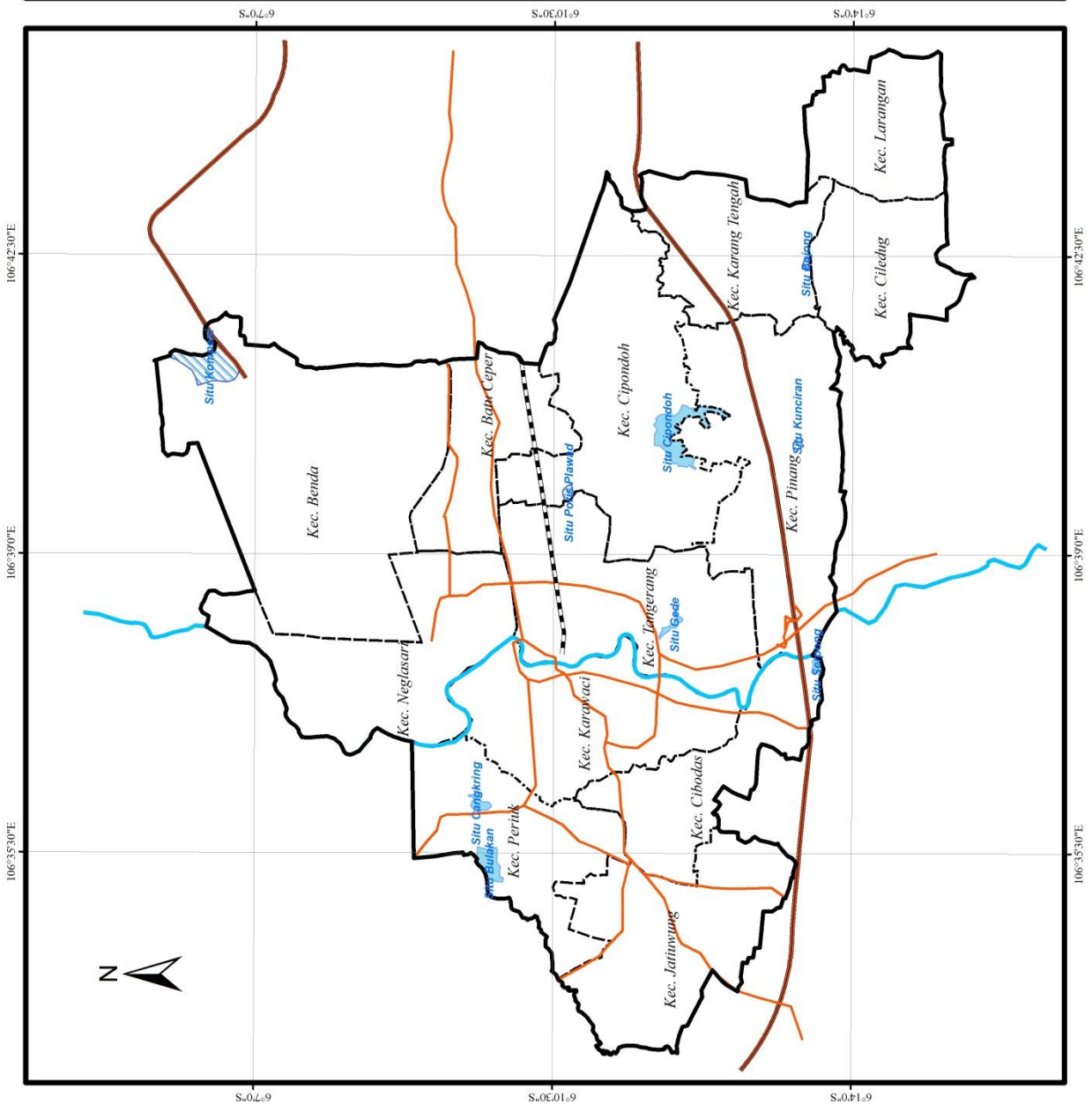
kawasan terbangun. Pemerintah Kota Tangerang yang seharusnya menjadi pengelola secara yuridis harus bertanggung jawab dan memerhatikan keberadaan situ – situ yang berada di Kota Tangerang.

Saat ini beberapa situ yang masih ada dengan keadaan yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas luasan serta volumenya dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Pengembang dan Masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Pengelola Situ Kota Tangerang

No	Nama Situ	Pengelola
1	Situ Cipondoh	Pemerintah Kota Tangerang dan Masyarakat Setempat
2	Situ Gede	PT Modern Land
3	Situ Bulakan	PT Sangiang Alam Permai, PT Duta Restu Alam dan PT Kartika Puja Kusuma
4	Situ Cangkring	Penggarap Liar dan Masyarakat Setempat
5	Situ Serpong	Pengelola Perumahan Paramount Serenade Lake

Sumber : Observasi, 2013



Peta Lokasi Situ yang Hilang

LEGENDA

- Jalan**
- Jalan Tol
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kereta Api

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Wilayah Studi

Lokasi Situ

- Situ yang Hilang
- Situ yang Ada

- Sungai

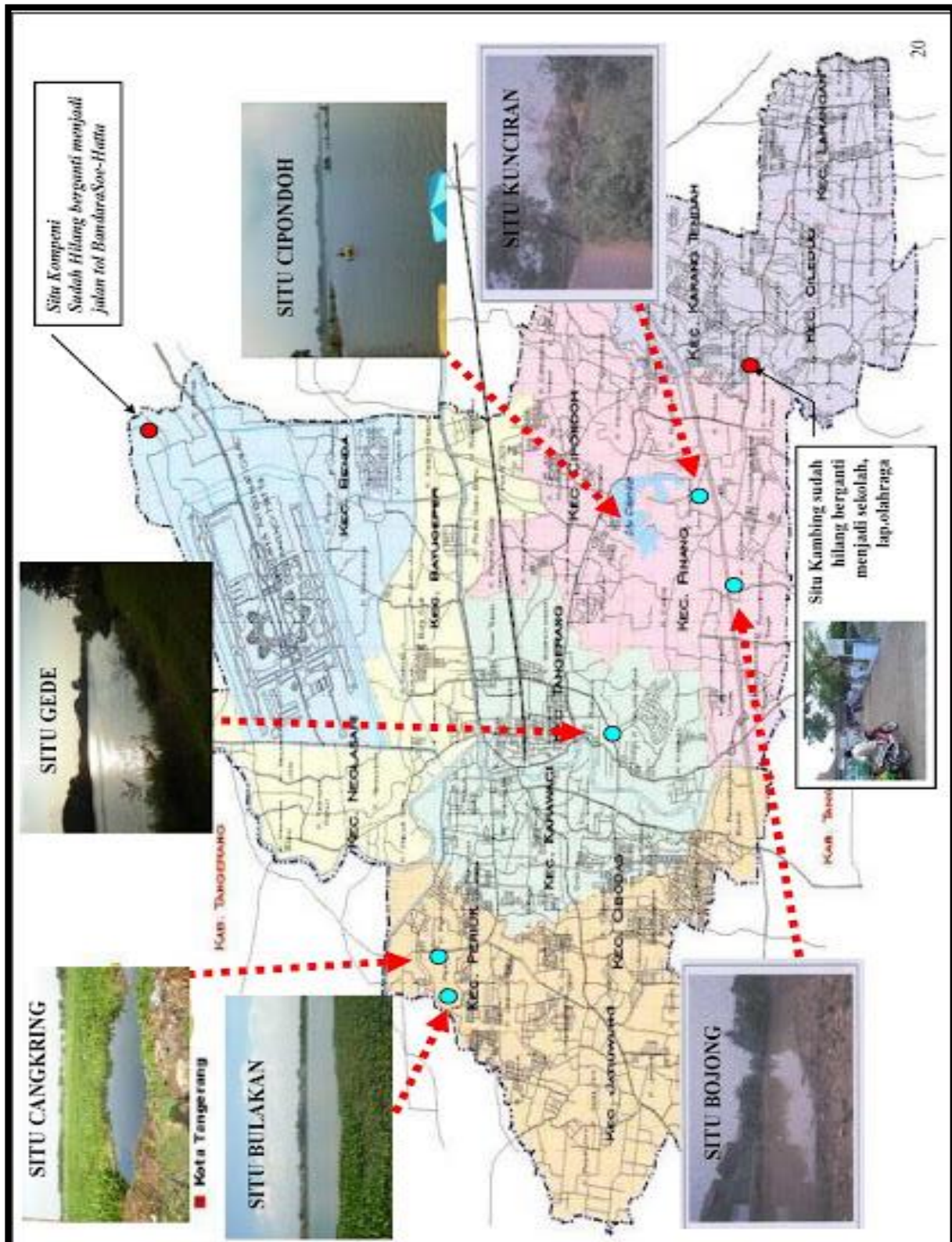
SUMBER

- Batas administrasi : Peta RTRW Kota Tangerang
- Situ yang hilang : Dinas Sumber Daya Air
- Lokasi situ yang ada : Dinas Sumber Daya Air

SKALA 1 : 80.000



UNIVERSITAS TRISAKTI
Fakultas Arsitektur Lansekap & Teknik Lingkungan
Jurusan Planologi



BAB IV

ANALISIS

4.1 Ruang Terbuka Hijau

4.1.1 Analisis Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas wilayah Kota Tangerang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Berdasarkan standar tersebut maka wilayah Kota Tangerang, yang memiliki luas 15.393 Hektar harus memiliki RTH Kota minimum seluas 4.617,9 Hektar dengan luasan RTH publik seluas 4.156,11 Hektar. Kebutuhan ini relatif tetap di tahun-tahun yang mendatang kecuali terjadi perubahan luas wilayah administrasi. Sementara RTH Kota Tangerang pada tahun 2011 hanya 32,43 Hektar atau hanya sekitar 0,18% dari luas RTH minimum yang seharusnya. Sehingga terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah RTH eksisting dengan standar yang ditetapkan yaitu sekitar 4.156,11 Hektar. Jika dihitung berdasarkan proyeksi perencanaan tahun 2015-2032, RTH Publik Kota Tangerang perlu dilakukan penambahan sekitar 181,08 Hektar tiap tahunnya.

4.1.2 Analisis Kebutuhan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Tangerang

Berdasarkan ketentuan yang tersirat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008, standar kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk adalah 20 m²/kapita. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2010 adalah 1,798,601 jiwa sehingga pada tahun 2010 Kota Tangerang seharusnya memiliki RTH seluas 35.972.020 m² atau setara dengan 3.597 ha. Sedangkan kenyataannya menurut data dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Penataan Ruang dalam kegiatan Lokakarya P2KH pada tahun 2011, bahwa luasan RTH Kota Tangerang pada tahun 2011 yaitu hanya 32,43 ha. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan RTH Kota Tangerang berdasarkan jumlah penduduknya masih belum terlampau.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 3 tahun terakhir adalah 2% per tahun (BPS, 2010). Sejauh ini tidak ada program khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Jika dilakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun

2015, 2020, 2025, 2030 dan 2035 dengan menggunakan rumus bunga berganda, dan diperoleh perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2015 yaitu 1,981,701 jiwa dengan kebutuhan RTH seluas 3.963 ha, pada tahun 2020 yaitu 2,183,440 jiwa dengan kebutuhan RTH seluas 4.367 ha, pada tahun 2025 yaitu 2,405,717 jiwa dengan kebutuhan RTH seluas 4.811 ha, pada tahun 2030 yaitu 2,650,622 jiwa dengan kebutuhan RTH seluas 5.301 ha, dan pada tahun 2035 yaitu 2,755,428 jiwa dengan kebutuhan RTH seluas 5.511 ha. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Kebutuhan RTH tiap Tahun Proyeksi

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah RTH
1	2015	1.981.701	3.963
2	2020	2.183.440	4.367
3	2025	2.405.717	4.811
4	2030	2.650.622	5.301
5	2035	2.755.428	5.511

Sumber : Analisa, 2013

Dapat disimpulkan bahwa setiap 5 tahun periode rata-rata deviasi kebutuhan RTH yaitu seluas 309,6 ha. Dengan kata lain, selama 1 periode (5 tahun), Kota Tangerang harus menambah luasan RTH sesuai dengan jumlah penduduk seluas 309,6 ha atau setara dengan 61,92 ha/tahun.

4.1.3 Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Luasan RTH Kota Tangerang belum memenuhi standar luas RTH sebesar 30% dari luas wilayah. RTH yang ada baru memenuhi 0,18% atau seluas 32,43 Ha. Sama halnya dengan belum terpenuhinya standar luas kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, di mana pada tahun berikutnya akan terjadi pertambahan jumlah penduduk sesuai dengan presentase pertumbuhan penduduk. Luas RTH publik yang dihitung berdasarkan standar 30% dari luas wilayah (20% RTH publik dan 10% RTH privat), khususnya untuk RTH publik masih terdapat selisih 3.634,17 Ha. Jika dihitung luasan RTH yang harus ditambah setiap tahun (selama 25 tahun proyeksi menggunakan standar 20%) yaitu 145,37 Ha dan 61,92 Ha (selama 25 tahun proyeksi menggunakan standar jumlah penduduk). Terdapat perbedaan penambahan luas RTH per tahun

antara standar 30% dan jumlah penduduk. Hal ini berarti dalam rangka mewujudkan RTH di Kota Tangerang diperlukan penambahan luas RTH antara 61,92 Ha s.d. 145,37 Ha per tahun.

Dalam rangka menambah luas RTH publik, Pemerintah Kota Tangerang dapat memaksimalkan kebutuhan RTH dari ruang di bawah jalur tegangan listrik tinggi / SUTET, bantaran Sungai Cisadane, jalur pengaman lintasan kereta api, hutan kota / taman kota, jalur hijau, pulau jalan dll. Di samping itu Pemerintah Kota Tangerang dapat membuat peraturan untuk menyediakan RTH privat kepada seluruh warga dan menyediakan RTH publik di lingkungan warga sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4.2 Situ

4.2.1 Analisis Penilaian Mutu Situ

Pada analisis yang ada, analisis dilakukan dengan melihat tabel indikator skoring yang telah di perbaharui dengan penilaian yang di lakukan dengan merubah nilai pada tabel yang di karenakan keterbatasan data yang ada

1) Situ Cipondoh

Tabel 4.2 Penilaian Situ Cipondoh

NO.	PARAMETER PENILAIAN	KONDISI	NILAI BOBOT
1	Penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir	Sedang (5-25%)	2
2	Sempadan	Ada, tidak jelas	2
3	Cekdam dan Pintu Air	Ada, berfungsi baik	3
4	Baku Mutu Air	Kelas III	2
Jumlah			9

Sumber : Analisa, 2013

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan memberikan penilaian pada point-point yang di tentukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi situ cipondoh aadalah “Terganggu” hal ini di nilai dari kondisi penyusutan lahan situ yang memiliki tingkat

sedang yaitu 5-25% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, kondisi sempadan yang ada namun kondisinya sudah tidak jelas karna sudah banyak di jadikan tempat berjualan bagi warga sekitar situ cipondoh, cekdam dan pintu air pada situ cipondoh memiliki lebih dari satu dan kondisinya masih baik dan sangat layak untuk di gunakan dan kondisi baku mutu airnya adalah tingkat III yang artinya kondisinya sama dapat digunakan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, penyiraman air tanaman atau lainnya yang di peruntukan untuk kegiatan sekelasnya.

2) Situ Gede

Tabel 4.3 Penilaian Situ Gede

NO.	PARAMETER PENILAIAN	KONDISI	NILAI BOBOT
1	Penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir	Tinggi (>25%)	1
2	Sempadan	Ada, tidak jelas	2
3	Cekdam dan Pintu Air	Ada, berfungsi baik	3
4	Baku Mutu Air	Kelas III	2
Jumlah			8

Sumber : Analisa, 2013

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan memberikan penilaian pada point-point yang di tentukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi situ gede adalah “Terganggu” hal di nilai dari kondisi penyusutan lahan situ yang sudah lebih dari 25% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, kondisi sempadan yang ada namun tidak jelas kondisinya saat ini dimana garis sempadan tidak sampai 5 meter dan di gunakan tempat pangkalan ojek setempat, salah satu fasilitas yang masih berfungsi dengan baik hingga saat ini adalah cekdam dan pintu air daripada situ gede ini dan kondisinya pun masih sangat layak untuk di gunakan dan sedangkan kondisi situ gede memiliki tingkat baku mutu air III yang dimana artinya kondisi airnya masih baik untuk di gunakan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, penyiraman air tanaman atau lainnya yang di peruntukan untuk kegiatan sekelasnya.

3) Situ Bulakan

Tabel 4.4 Penilaian Situ Bulakan

NO	PARAMETER PENILAIAN	KONDISI	NILAI BOBOT
1	Penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir	Tinggi (>25 %)	1
2	Sempadan	Ada, tidak jelas	2
3	Cekdam dan Pintu Air	Ada, tidak berfungsi	2
4	Baku Mutu Air	Kelas III	2
Jumlah			7

Sumber : Analisa, 2013

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan memberikan penilaian pada point-point yang di tentukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi situ bulakan adalah “Terganggu” hal ini dinilai dari terjadinya penyusutan lahan situ lebih dari 25% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, situ bulakan memiliki sempadan namun pada lokasi garis sempadan pada situ bulakan tidaklah jelas karna banyak dari garis sempadan yang sudah menyusut, tidak berfungsinya cekdam pada situ bulakan menjadi salah satu nilai minus bagi situ ini mengingat pentingnya cekdam pada sebuah situ, sedangkan baku mutu airnya adalah tingkat III yang artinya kondisinya sama dengan Situ Cipondoh dan Situ Gede yaitu dapat di gunakan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, penyiraman air tanaman atau lainnya yang di peruntukan untuk kegiatan sekelasnya.

4) Situ Cangkring

Tabel 4.5 Penilaian Situ Cangkring

NO	PARAMETER PENILAIAN	KONDISI	NILAI BOBOT
1	Penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir	Rendah (<5%)	3
2	Sempadan	Tidak Ada	1
3	Cekdam dan Pintu Air	Tidak Ada	1
4	Baku Mutu Air	Kelas IV	1
Jumlah			6

Sumber : Analisa, 2013

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan memberikan penilaian pada point-point yang di tentukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi situ cangkring adalah “Buruk”, walaupun penyusutan lahan situ kurang dari 5% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, situ cangkring tidak memiliki sempadan karna banyak dari garis sempadan yang berbatasan langsung dengan bibir jalan dan tembok pembatas dari area industri yang ada di sekitar situ tersebut, tidak adanya cekdam pada situ cangkring, sedangkan baku mutu airnya adalah tingkat IV yang artinya peruntukannya dapat di gunakan untuk mengairi pertamanan atau lainnya yang di peruntukan untuk kegiatan sekelasnya.

5) Situ Serpong

Tabel 4.6 Penilaian Situ Serpong

NO	PARAMETER PENILAIAN	KONDISI	NILAI BOBOT
1	Penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir	Rendah (<5%)	3
2	Sempadan	Ada, jelas, sempadan relatif hijau	3
3	Cekdam dan Pintu Air	Ada, berfungsi baik	3
4	Baku Mutu Air	Kelas III	2
Jumlah			11

Sumber : Analisa, 2013

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan memberikan penilaian pada point-point yang di tentukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kondisi situ serpong adalah “Baik” hal ini di nilai dari kondisi penyusutan lahan situ yang memiliki tingkat rendah yaitu kurang dari 5% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, kondisi sempadan yang ada, jelas dan relatif hijau (terdapat taman dan jogging track di sempadan situ), cekdam dan pintu air pada situ serpong kondisinya masih baik dan sangat layak untuk di gunakan dan kondisi baku mutu airnya adalah tingkat III yang artinya kondisinya sama dapat digunakan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, penyiraman air tanaman atau lainnya yang di peruntukan untuk kegiatan sekelasnya

4.2.2 Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Situ

Dari semua situ yang ada di Kota Tangerang 3 dari situ yang ada yaitu situ Cipondoh, Gede dan Bulakan belum sesuai dengan fungsi dari situ sedangkan 1 situ yaitu Cangkring tergolong dalam kondisi buruk hal ini di sebabkan karna kondisi dari situ tersebut belum memenuhi standar fungsi situ dikarenakan berbagai kondisi dari situ tersebut seperti sempadan, kualitas air situ, kebersihan situ, RTH di sekitar situ, cekdam dan pintu air. Karena kurangnya hal-hal tersebut pada kondisi eksisting situ menyebabkan menurunnya fungsi situ dimana

seharusnya situ-situ tersebut dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai fungsi situ bukan hanya sebagai tempat wadah bagi air.

Pada Situ Serpong kondisi dari situ ini sudah sesuai dengan fungsi dari situ, kondisi eksisting dari situ serpong seperti sempadan, kualitas air, kebersihan situ, RTH di sekitar situ, cekdam dan pintu air telah memiliki kualitas yang baik dan layak di karenakan kondisi situ merupakan situ privat yang di fungsikan sebagai situ untuk kawasan klaster elit di perumahan Paramount Serenade Lake dan memiliki pengelola yang khusus (pengelola perumahan Paramount Serenade Lake) berbeda dengan 4 situ lainnya yang di kelola oleh warga sekitaran situ dan Pemerintah Kota Tangerang

Strategi pengembangan pada ke 4 situ yang di dikelola oleh warga sekitar dan Pemerintah Kota Tangerang sudah seharusnya di kembangkan secara optimal dan konsisten. Pengembangan situ dapat di lakukan dengan berbagai cara seperti penambahan fungsi sebagai sarana rekreasi maupun wisata alam, budidaya ikan, budidaya tanaman air dan cadangan air bersih. Pemerintah Kota Tangerang dan Masyarakat harus lebih konsisten dalam mengembangkan situ khususnya terhadap situ – situ yang tergolong “terganggu dan buruk” agar Pemerintah melakukan upaya penyadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan upaya revitalisasi atau rehabilitasi situ, sedangkan untuk situ yang tergolong “baik” Pemerintah harus meningkatkan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem. Pengembangan pada situ harus memperhatikan fungsi konservasi dan preservasi sebagaimana tertuang di dalam RTRW Kota Tangerang. Pemanfaatan situ untuk kawasan rekreasi adalah salah satu solusi yang cukup baik untuk menjaga keberadaan dan fungsi situ dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi dan preservasi.

Pengelolaan situ harus dilakukan secara bijaksana, agar kelestarian situ dapat dijaga dan dipertahankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengelolaan situ adalah perlunya penetapan system zonasi dan sempadan situ, agar kegiatan yang dikembangkan di kawasan situ, tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada fungsi utama situ itu sendiri. Dari seluruh situ yang ada di Kota Tangerang hanya situ Cangkring yang tidak memiliki system zonasi dan sempadan situ, sedangkan 4 situ lainnya memiliki system zonasi dan sempadan situ. Dapat disimpulkan pengelolaan situ di Kota Tangerang sudah cukup baik walaupun dalam hal sempadan masih ada beberapa situ yang tidak jelas batasan sempadannya, akibat beberapa

aktifitas masyarakat seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian, perdagangan dan pemanfaatan lainnya.

Secara kebijakan pengelolaan situ bertujuan untuk perlindungan dan peningkatan fungsi situ, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan situ. Situ – situ di Kota Tangerang secara kebijakan pengelolaan masih sangat lemah dan tidak konsisten, dapat dilihat dari upaya perlindungan dan peningkatan fungsi situ secara umum yang masih diabaikan oleh Pemerintah, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara tidak bijaksana yang menyebabkan menurunnya kualitas situ – situ di Kota Tangerang. Upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga masih kurang baik, seperti situ Cangkring yang tertutup sampai seluruh badan situ oleh tanaman liar. Kemudian upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan situ – situ di Kota Tangerang seakan tidak maksimal dengan kurangnya upaya Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap situ termasuk kategori “rusak”.

4.2.3 Analisis Kontribusi Situ Terhadap Kota Tangerang

Secara umum kontribusi situ terhadap kota adalah sebagai ruang terbuka bagi kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Kota Tangerang. Adanya situ juga menambah nilai estetika kota, cadangan air bersih dan sebagai penahan banjir. Situ – situ di Kota Tangerang saat ini sudah mengalami pengurangan secara kuantitas dengan berkurangnya 4 dari sembilan situ yang pernah ada di Kota Tangerang, sehingga menyebabkan berkurangnya kontribusi situ terhadap Kota Tangerang. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya daerah yang terkena banjir di Kota Tangerang, mutu air yang rata – rata tergolong kelas III juga mengartikan bahwa air yang ada di situ – situ Kota Tangerang tidak dapat dimanfaatkan sebagai air bersih, sedangkan nilai estetika kota yang diberikan oleh situ – situ di Kota Tangerang sudah cukup baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik Kota Tangerang terutama kondisi RTH dan Situ dalam keadaan yang belum ideal. Kondisi fisik RTH publik di Kota Tangerang masih belum sesuai dengan arahan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Sementara RTH Kota Tangerang pada tahun 2011 hanya 32,43 Hektar atau hanya sekitar 0,18% dari luas RTH minimum yang seharusnya. Setelah dilakukan analisa perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, maka Kota Tangerang membutuhkan RTH Kota minimum seluas 4.617,9 Hektar dengan luasan RTH publik seluas 4.156,11 Hektar. Kebutuhan ini relatif tetap di tahun-tahun yang mendatang kecuali terjadi perubahan luas wilayah administrasi. Selanjutnya dihitung berdasarkan proyeksi perencanaan tahun 2015-2032 (selama 17 tahun), RTH Publik Kota Tangerang perlu dilakukan penambahan sekitar 181,08 Hektar tiap tahunnya. Luasan ini dapat ditingkatkan jika Kota Tangerang ingin lebih cepat mencapai RTH 30% selama kurun waktu kurang dari 17 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi situ di Kota Tangerang mengalami penurunan kualitas. Salah satunya terbukti dengan adanya perubahan luasan situ dalam 10 tahun terakhir. Selain itu dari 9 situ yang ada di Kota Tangerang, 4 di antaranya sudah tidak ada atau dengan kata lain sudah berubah fungsinya menjadi lahan terbangun. Untuk mengetahui kualitas dari 5 situ yang masih ada, dilakukan metode skoring dengan parameter diantaranya (1) penyusutan luas dalam 10 tahun terakhir, (2) sempadan, (3) cekdam dan pintu air, (4) baku mutu air. Dari hasil analisa, dapat diklasifikasikan 3 kategori kondisi situ baik, terganggu dan rusak. Dapat disimpulkan bahwa Situ Serpong satu-satunya situ dalam keadaan baik; Situ Cipondoh, Situ Gede, dan Situ Bulakan dalam keadaan terganggu, dan Situ Cangkring dalam keadaan rusak. Kelima situ yang masih bertahan ini sebaiknya dipertahankan dan dilakukan perbaikan terutama untuk situ yang terganggu dan rusak. Mengingat pentingnya fungsi dari situ itu sendiri sebagai reservoir air hujan agak tidak terjadi banjir di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya.

5.2. Saran

Dalam rangka memaksimalkan RTH Publik, Pemerintah Kota Tangerang dapat memanfaatkan RTH dengan fungsi khusus seperti jalur hijau, jalur listrik bertegangan tinggi (SUTET), bantaran sungai, pinggir lintasan kereta api, pemakaman dan lain sebagainya. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang dapat membuat peraturan mengenai penyediaan RTH kepada semua pihak yang ingin melakukan pembangunan atau pengembangan kawasan. Peraturan ini dapat berupa koefisien dasar hijau (KDH) yang ditetapkan sekian persen berdasarkan kebijakan penyediaan RTH.

Pengeolaan situ selama ini dilakukan antara warga dan Pemerintah Kota Tangerang, sebaiknya kerjasama dalam hal pengelolaan ini dapat terjalin secara maksimal. Pemerintah Kota Tangerang tidak mungkin dapat mengawasi jika ada kecurangan dalam operasional dan/atau pengelolaan situ, sehingga dengan adanya warga sekitar dapat membantu Pemerintah dalam hal pengawasan. Namun di sisi lain, Pemerintah juga harus bersikap tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan situ harus ditindak sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam hal pengembangan situ yang masih ada di Kota Tangerang, disarankan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan itu dapat berupa pengecekan kondisi permukaan situ, cekdam, melakukan pengerukan situ yang sudah mulai dangkal, dan mempertahankan sempadan situ yang rawan digunakan untuk pemanfaatan lahan terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Penataan Ruang . 2009. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 12/PRT/M 2009*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum
- Dirjen Penataan Ruang. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum
- Ismaun, Iwan dan Nirwono Joga. 2011. *RTH 30 Persen! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pemerintah Kota Tangerang. 2012. *Kota Tangerang Dalam Angka 2012*. Tangerang : BPS Kota Tangerang
- Pemerintah Kota Tangerang. 2012. *Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 6 Tahun 2012*. Tangerang : Pemerintah Kota Tangerang
- Pancawati, Juwarin. 2010. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang*. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Rahman, Arofa. 2010. *Potensi Pengembangan Situ di Kota Bogor Sebagai Objek Wisata*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- <http://www.scribd.com/doc/61752553/KONSEP-PENGELOLAAN-SITU>
- <http://antonirfanilham.blogspot.com/2011/07/situ-di-kota-tangerang-riwayatmu-doeloe.html>
- www.probenteng.com/Sjaifuddin%20Situ.html
- <http://www.dsdap.bantenprov.go.id/read/contents/68.html>
- http://sentanaonline.com/detail_news/main/13195/1/12/09/2013/Propinsi-Banten-dan-Kota-Tangerang-Beda-Pendapat-Luas-Situ-Bulakan
- <http://antonirfanilham.blogspot.com/2011/08/situ-bulakan-kota-tangerang.html>